



Dinas

Dagkoprinun

Lutim

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2021 - 2026

**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur
Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (0474) 321423**

KATA

ii

PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Teknoratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian disusun sebagai komitmen bersama dalam

pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur serta menjadi arah, acuan dan motivasi peningkatan kinerja bagi pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

iii

Malili, November 2021
Kepala Dinas,



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19650110 198602 2 004



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 6 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 10 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 12 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 12 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 19 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 42 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 64 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 67 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 67 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 68 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... | 74 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 80 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 86 |



| | | |
|-----------------|--|------------|
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN..... | 89 |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 89 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 91 |
| | 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... | 91 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN... | 95 |
| | 6.1 Rencana Program dan kegiatan..... | 95 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 115 |
| | 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 115 |
| BAB VIII | PENUTUP..... | 119 |



BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan daerah yang handal dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan harapan apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD dan RENJA SKPD. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama dengan SKPD diwajibkan menyusun dokumen dimaksud diantaranya adalah RENSTRA SKPD.

2

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik SKPD dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. SKPD bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA SKPD ini adalah :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan RENJA SKPD;
- b. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP SKPD;
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum RENSTRA SKPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang arah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategi atas potensi, peluang,

permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3

Dalam pelaksanaannya, RENSTRA ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stakeholder yang terkait dengan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini karena pembangunan daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan Rencana Strategis SKPD merupakan sub sistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis SKPD harus bersinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur diharapkan :

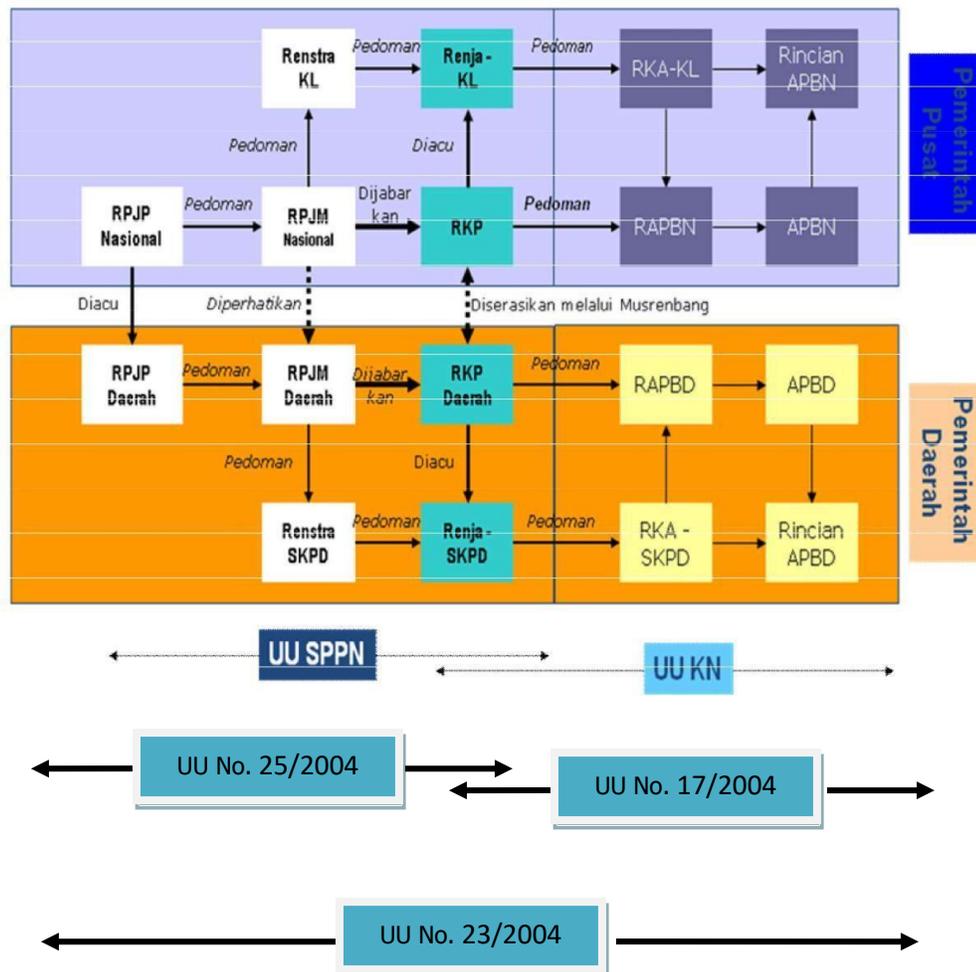
1. Dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi dan program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
2. Dapat memberikan arah terhadap perkembangan daerah dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga dengan demikian akan tumbuh terbangun "sense of ownership" dari rencana strategis tersebut;
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis dan permasalahan prioritas di sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
4. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;



5. Dapat merumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan;
6. Dapat menghasilkan acuan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

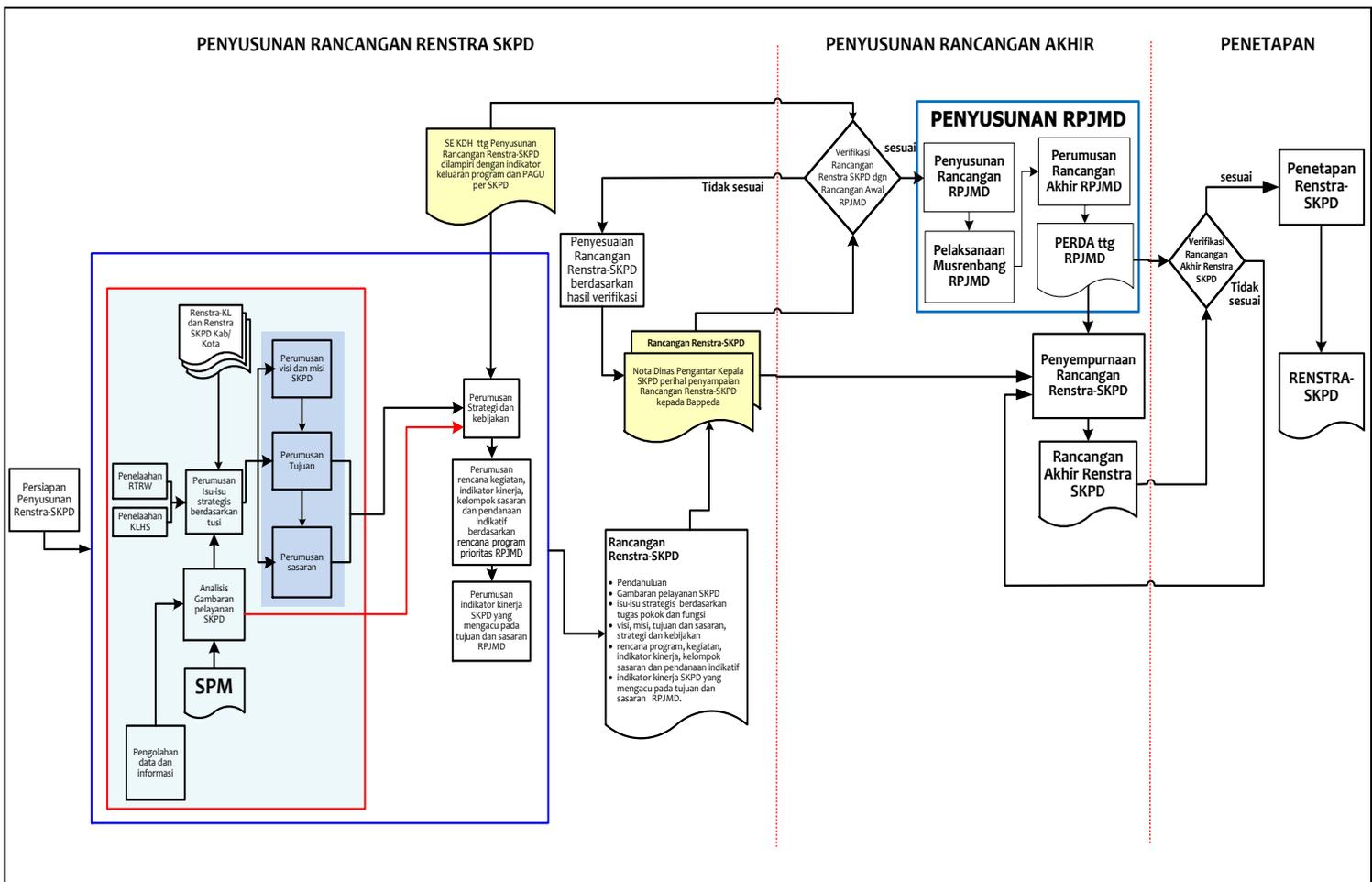
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Disdagkoprinum yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdagkoprinum. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disdagkoprinum dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD



1.2 Landasan Hukum

6

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 20. Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2).



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Disdagkoprinum, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholders* sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi dan Misi dari Disdagkoprinum Kabupaten Luwu Timur. Tujuan penyusunan rencana strategis oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP);
4. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.3 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang berisi latar belakang, dasar hukum

penyusunan RENSTRA, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RENSTRA

11

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Bagian ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Berisi indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian termasuk IKU dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dengan tugas: "***membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;

- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
- f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang UMKM;
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang

perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolagian sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan. Bidang Perdagangan dengan tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Seksi Kemetrolgian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrolgian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Koperasi dengan dua seksi yaitu :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Bidang UMKM dengan dua seksi, yaitu :

- a. Seksi Informasi dan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

Tugas Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang

fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.





Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Pada saat ini jumlah pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

| Pendidikan | | | | | | | |
|------------|----|----|----|------|------|----|--------|
| | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
| ASN | 4 | 16 | - | 2 | - | - | 22 |
| Upah Jasa | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| Jumlah | | | | | | | 34 |

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

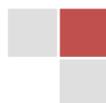
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa dengan tingkat tingkat pendidikan S2 sebanyak 4 orang (11,76%), S1 sebanyak 19 orang (55,88%), D3 sebanyak 1 orang (2,94%), SLTA sebanyak 8 orang (23,52%), SLTP sebanyak 1 orang (2,94%) dan SD sebanyak 1 orang (2,94%).

Komposisi pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

| Jenis Kelamin | | |
|---------------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| ASN | 12 | 10 |
| Upah Jasa | 5 | 7 |
| Jumlah | 17 | 17 |

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian



Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa sesuai jenis kelamin, laki-laki sebanyak 17 orang (50%), perempuan sebanyak 17 orang (50%).

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan/ruang adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.3 berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2020

| No | Golongan/Ruang | Jumlah |
|---------------------|----------------|--------|
| 1. | IV / e | - |
| 2. | IV / d | - |
| 3. | IV / c | 1 |
| 4. | IV / b | 2 |
| 5. | IV / a | 2 |
| Jumlah Golongan IV | | 5 |
| 1. | III / d | 9 |
| 2. | III / c | 1 |
| 3. | III / b | 2 |
| 4. | III / a | 3 |
| Jumlah Golongan III | | 15 |
| 1. | II / d | 1 |
| 2. | II / c | 1 |
| 3. | II / b | - |
| 4. | II / a | - |
| Jumlah Golongan II | | 2 |

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk golongan IV sebanyak 5 orang (22,72%), golongan III sebanyak 15 orang (68,18%), golongan II sebanyak 2 orang (9,09%).

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dengan

jabatan struktural, fungsional, pelaksana adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.4 berikut :

21

Tabel 2.2.4
Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

| | Jabatan | | | | | | |
|--------|------------|------|------|-----|-----|------------|-----------|
| | Struktural | | | | | Fungsional | Pelaksana |
| | Eselon | | | | | | |
| | IIa | IIIa | IIIb | Iva | IVb | | |
| ASN | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 8 |
| Jumlah | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 8 |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan struktural sebanyak 14 orang (63,63%) dan pelaksana sebanyak 8 orang (36,36%).

b. Sarana dan Prasarana

Jumlah aset tetap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 104.993.500.009,06 dengan rincian sebagaimana Tabel 2.2.5 berikut :

Tabel 2.2.5
Rincian Aset Tetap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
(Per 31 Desember 2020)

| No | Jenis Aset Tetap | Nilai (Rp) |
|----|----------------------------|------------------|
| 1. | Tanah | 5.063.238.687,00 |
| 2. | Alat Besar | 7.425.000,00 |
| 3. | Komputer | 570.612.600,00 |
| 4. | Alat Keselamatan Kerja | 34.552.000,00 |
| 5. | Alat Angkutan | 1.112.972.180,00 |
| 6. | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 193.695.001,00 |
| 7. | Alat Pertanian | 171.820.000,00 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| 8. | Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga | 1.118.777.000,00 |
| 9. | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 141.735.150,00 |
| 10. | Alat Laboratorium | 631.474.410,00 |
| 11. | Bangunan Gedung | 90.058.567.719,21 |
| 12. | Jalan dan Jembatan | 877.373.371,85 |
| 13. | Bangunan Air | 94.973.600,68 |
| 14. | Instalasi | 242.600.000,00 |
| 15. | Jaringan | 138.849.600,00 |
| 16. | Tanaman | 9.680.000,00 |
| 17. | Aset Tetap Dalam Renovasi | 4.525.153.689,32 |
| | Jumlah | 104.993.500.009,06 |

Sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana pada Tabel 2.2.6 dibawah ini :

Tabel 2.2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
(Per 31 Desember 2020)

| No | Jenis Barang/Nama Barang | Jumlah | Tahun Pembelian/Lokasi | Kondisi Bangunan (B,KB,RB) |
|----|--------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Tanah Bangunan Pasar | 1 unit | Tahun 2002, Luas 14.221 M2 | Baik |
| 2. | Tanah Bangunan Pasar | 1 unit | Tahun 2005, Luas 8180 M2 | Baik |
| 3. | Tanah Bangunan Pasar | 1 unit | Tahun 2005, Luas 26.543 | Baik |
| 4. | Tanah Bangunan Pasar | 1 unit | Tahun 2005, Luas 9415 M2 | Baik |
| 5. | Tanah Bangunan Pasar | 1 unit | Tahun 2009, Luas 27.041 M2 | Baik |
| 6. | Tanah Bangunan Pasar | 1 unit | Tahun 2011, Luas 9711 M2 | Baik |
| 7. | Tanah Bangunan Pasar | 1 unit | Tahun 2015, Luas 6513 M2 | Baik |

| | | | | |
|-----|---|---------|-----------------------------|----------------|
| 8. | Tanah Bangunan Pertokoan/rumah Toko/Koperasi | 1 unit | Tahun 2020, Luas 1360 M2 | Baik |
| 9. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 unit | Tahun 2005, Luas 2791 M2 | Baik |
| 10. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 unit | Tahun 2014, Luas 8005 M2 | Baik |
| 11. | Pompa Air | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 12. | Pompa Air Merk Shimizu | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 13. | Pompa Air Merk Shimizu | 3 unit | Tahun 2020 | Baik |
| 14. | Station Wagon Merk Toyota/Innova | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 15. | Station Wagon Merk Toyota/Hilux | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 16. | Pick Up Merk Suzuki Carry Pick Up | 1 unit | Hibah Tahun 2014 | Baik |
| 17. | Sepeda Motor Shougun 125 R | 1 unit | Tahun 2005 | Baik |
| 18. | Sepeda Motor Shougun 125 R | 1 unit | Tahun 2005 | Kurang Baik |
| 19. | Sepeda Motor Honda/Blade R Repsol | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 20. | Sepeda Motor Yamaha All New Xride/All New Xride | 2 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 21. | Sepeda Motor Yamaha/N-Max | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 22. | Gerobak Dorong | 20 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 23. | Global Positioning System | 1 unit | Tahun 2010 | Baik |
| 24. | Scanner (Universal Tester) | 1 unit | Tahun 2016 | Rusak Berat |
| 25. | Stopwatch | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 26. | Tool Set | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 27. | Landasan Cap Lengkap | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 28. | Tang Plombir/Segel | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 29. | Bejana Ukur 5 liter | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 30. | Bejana Ukur 10 liter | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 31. | Bejana Ukur 20 liter | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 32. | Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya) | 1 unit | Tahun 2004 | Baik |
| 33. | Alat Ukur Kadar Air (Alat | 2 unit | Tahun 2014 | Baik |

| | | | | | |
|-----|---|--------|------------|-------------|----|
| | Ukur Lainnya) | | | | |
| 34. | Alat Ukur Lain-Lain | 2 unit | Tahun 2018 | Baik | 24 |
| 35. | Timbangan Meja Kapasitas 10 kg | 1 unit | Tahun 2004 | Rusak Berat | |
| 36. | Timbangan Cepat Kapasitas 10 kg | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat | |
| 37. | Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 38. | Anak Timbangan/Biara Lainnya | 2 unit | Tahun 2004 | Rusak Berat | |
| 39. | Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram | 1 unit | Tahun 2004 | Baik | |
| 40. | Jaring Angkat Lainnya | 1 unit | Tahun 2007 | Rusak Berat | |
| 41. | Jaring Angkat Lainnya | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat | |
| 42. | Mesin Ketik Standar (14- 16) Merk Olimpia | 1 unit | Tahun 2004 | Rusak Berat | |
| 43. | Mesin Ketik Standar (14- 16) | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat | |
| 44. | Mesin Ketik Standar (14- 16) Merk Brother | 1 unit | Tahun 2006 | Rusak Berat | |
| 45. | Mesin Ketik Standar (14- 16) Merk Royal | 1 unit | Tahun 2006 | Rusak Berat | |
| 46. | Mesin Ketik Standar (14- 16) Merk Brother/M-2000 Deluxe | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 47. | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci) | 1 unit | Tahun 2005 | Kurang Baik | |
| 48. | Mesin Absen (Time Recorder) | | | | |
| 49. | Lemari Besi/ Metal | 1 unit | Tahun 2011 | Baik | |
| 50. | Lemari Besi/Metal | 2 unit | Tahun 2011 | Baik | |
| 51. | Lemari Besi/Metal | 4 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 52. | Lemari Besi/Metal | 1 unit | Tahun 2016 | Baik | |
| 53. | Lemari Besi/Metal | 4 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 54. | Lemari Kayu | 1 unit | Tahun 2004 | Rusak Berat | |
| 55. | Lemari Kayu | 1 unit | Tahun 2005 | Kurang Baik | |
| 56. | Lemari Kayu | 1 unit | Tahun 2006 | Rusak Berat | |

| | | | | |
|-----|----------------------|--------|------------|-------------|
| 57. | Lemari Kayu | 2 unit | Tahun 2007 | Rusak Berat |
| 58. | Lemari Kayu | 1 unit | Tahun 2007 | Baik |
| 59. | Lemari Kayu | 5 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 60. | Lemari Kayu | 3 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 61. | Lemari Kayu | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 62. | Lemari Kayu | 4 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 63. | Lemari Kayu | 1 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 64. | Filling Kabinet Besi | 1 unit | Tahun 2010 | Baik |
| 65. | Filling Kabinet Besi | 2 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 66. | Filling Kabinet Besi | 3 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 67. | Brankas | 1 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 68. | Brankas | 1 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 69. | Lemari Kaca | 5 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 70. | Lemari Kaca | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 71. | White Board | 2 unit | Tahun 2007 | Rusak Berat |
| 72. | White Board | 2 unit | Tahun 2008 | Baik |
| 73. | Display | 2 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 74. | Display | 4 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 75. | Papan Nama Instansi | 1 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 76. | Papan Nama Instansi | 2 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 77. | Papan Pengumuman | 2 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 78. | Papan Pengumuman | 4 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 79. | Teralis | 1 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 80. | Meja Kerja Kayu | 1 unit | Tahun 2004 | Rusak Berat |
| 81. | Meja Kerja Kayu | 1 unit | Tahun 2005 | Baik |
| 82. | Meja Kerja Kayu | 1 unit | Tahun 2006 | Baik |
| 83. | Meja Kerja Kayu | 1 unit | Tahun 2006 | Rusak Berat |
| 84. | Meja Kerja Kayu | 3 unit | Tahun 2007 | Baik |
| 85. | Meja Kerja Kayu | 2 unit | Tahun 2008 | Baik |
| 86. | Meja Kerja Kayu | 4 unit | Tahun 2008 | Baik |
| 87. | Meja Kerja Kayu | 5 unit | Tahun 2009 | Baik |
| 88. | Meja Kerja Kayu | 3 unit | Tahun 2010 | Baik |

| | | | | |
|------|------------------|---------|------------|-------------|
| 89. | Meja Kerja Kayu | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 90. | Meja Kerja Kayu | 3 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 91. | Kursi Kayu | 1 unit | Tahun 2005 | Baik |
| 92. | Meja Rapat | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 93. | Kasur/Spring Bed | 1 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 94. | Meja Makan Besi | 2 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 95. | Meja Makan Besi | 6 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 96. | Meja Makan Besi | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 97. | Kursi Rapat | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 98. | Kursi Rapat | 48 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 99. | Kursi Tamu | 1 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 100. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2007 | Baik |
| 101. | Kursi Putar | 2 unit | Tahun 2007 | Rusak Berat |
| 102. | Kursi Putar | 4 unit | Tahun 2008 | Baik |
| 103. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2008 | Baik |
| 104. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 105. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2009 | Kurang Baik |
| 106. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 107. | Kursi Putar | 3 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 108. | Kursi Putar | 4 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 109. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat |
| 110. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat |
| 111. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat |
| 112. | Kursi Putar | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat |
| 113. | Kursi Putar | 3 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 114. | Kursi Biasa | 10 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 115. | Kursi Biasa | 26 unit | Tahun 2012 | Rusak |

| | | | | Berat |
|------|--------------------------|---------|------------|-------------|
| 116. | Kursi Biasa | 10 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 117. | Bangku Tunggu | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 118. | Bangku Tunggu | 3 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 119. | Sofa | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 120. | Sofa | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 121. | Meubelur lainnya | 1 unit | Tahun 2013 | Baik |
| 122. | Mesin Pemotong Rumput | 1 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 123. | Mesin Pemotong Rumput | 2 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 124. | Mesin Pemotong Rumput | 1 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 125. | Lemari Es | 1 unit | Tahun 2009 | Baik |
| 126. | Lemari Es | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 127. | A.C Window | 1 unit | Tahun 2006 | Rusak Berat |
| 128. | A.C Window | 1 unit | Tahun 2009 | Baik |
| 129. | A.C Window | 1 unit | Tahun 2010 | Baik |
| 130. | A.C Window | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 131. | A.C Window | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 132. | A.C Window | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 133. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2011 | Baik |
| 134. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2011 | Baik |
| 135. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2011 | Baik |
| 136. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2011 | Baik |
| 137. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2012 | Baik |
| 138. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2012 | Baik |
| 139. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2012 | Baik |
| 140. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2012 | Baik |
| 141. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2012 | Baik |
| 142. | A.C Window | 5 Unit | Tahun 2016 | Baik |
| 143. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2017 | Baik |
| 144. | A.C Window | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 145. | A.C Split | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 146. | Kompore Gas (Alat Dapur) | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 147. | Treng Air/Tandon Air | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 148. | Alat Dapur lainnya | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 149. | Alat Dapur lainnya | 1 unit | Tahun 2009 | Baik |
| 150. | Televisi | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 151. | Sound System | 1 unit | Tahun 2016 | Baik |

| | | | | |
|------|-------------------------------|--------|------------|-------------|
| 152. | Wireless | 1 unit | Tahun 2006 | Baik |
| 152. | Camera film | 1 unit | Tahun 2007 | Rusak Berat |
| 153. | Camera film | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 151. | Gordyin/kra | 1 un | Tahun 2011 | Baik |
| 152. | Gordyin/kra | 1 unit | Tahun 2011 | baik |
| 153. | Gordyin/kray | | | |
| 154. | Gordyin/kray | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 155. | Lampu | 2 unit | Tahun 2005 | Rusak berat |
| 156. | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 157. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2004 | Baik |
| 158. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 159. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 160. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 161. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 3 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 162. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 6 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 163. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 164. | A.C Window | 5 Unit | Tahun 2016 | Baik |
| 165. | A.C Window | 1 Unit | Tahun 2017 | Baik |
| 166. | A.C Window | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 167. | A.C Split | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 168. | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 169. | Treng Air/Tandon Air | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 170. | Alat Dapur lainnya | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 171. | Alat Dapur lainnya | 1 unit | Tahun 2009 | Baik |
| 172. | Televisi | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 173. | Sound System | 1 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 174. | Wireless | 1 unit | Tahun 2006 | Baik |
| 175. | Camera film | 1 unit | Tahun 2007 | Rusak Berat |
| 176. | Camera film | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |

| | | | | |
|------|--------------------------------|--------|------------|-------------|
| 177. | Gordyin/kra | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 178. | Gordyin/kray | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 179. | Gordyin/kray | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 180. | Lampu | 2 unit | Tahun 2005 | Rusak berat |
| 181. | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 182. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2004 | Baik |
| 183. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 184. | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 185. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 186. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 3 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 187. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 6 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 188. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 189. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 190. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 191. | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 2 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 192. | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2004 | Rusak Berat |
| 193. | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 194. | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 195. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 unit | Tahun 2005 | Baik |
| 196. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 197. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 198. | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 199. | Meja Kerja Pejabat | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |

| | | | | |
|------|-----------------------------------|--------|------------|-------------|
| 200. | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 2 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 201. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2010 | Baik |
| 202. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 203. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 204. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 205. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 206. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 207. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2016 | Rusak berat |
| 208. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 2 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 209. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 210. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 211. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2010 | Baik |
| 212. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 213. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 214. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 215. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 216. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 217. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2016 | Rusak berat |
| 218. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 2 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 219. | Kursi Kerja Pejabat | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |

| | | | | |
|------|---|--------|------------|-------------|
| 220. | Eselon IV Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 221. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2010 | Baik |
| 222. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 223. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 224. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 225. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 226. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 227. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2016 | Rusak berat |
| 228. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 2 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 229. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 230. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 231. | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 2 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 232. | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 233. | Peralatan Studio Audio lainya (dst) | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 234. | Layar Film/Projek | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 235. | Layar Film/Projek | 1 unit | Tahun 2007 | Baik |
| 236. | Layar Film/Projek | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 237. | Telephone (PABX) | 1 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 238. | Facsimile | 1 unit | Tahun 2004 | Rusak Berat |
| 239. | Genset | 1 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 240. | Timbangan Elektronik | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 241. | Timbangan Elektronik | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 242. | Timbangan Elektronik | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 243. | Video Printer | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |

| | | | | |
|------|---|----------|------------|-------------|
| 244. | Video Printer | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 245. | Video Printer | 1 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 246. | Rabbing Machine | 2 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat |
| 247. | Alat Dengreening Jeruk Kap 100 kg | 5 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 248. | Thermometer Digital (Alat laboratorium lainnya) | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 249. | Anak Timbangan | 2 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 250. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 251. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 252. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 253. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 254. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 255. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 256. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 257. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 258. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 259. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 260. | Anak Timbangan | 200 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 261. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 262. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 263. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 264. | Anak Timbangan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 265. | Gelas Ukur | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 266. | Pot Besi | 17 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 267. | Recorder Display lainnya (dst) | 4 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 268. | Recorder Display lainnya (dst) | 2 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 269. | Recorder Display lainnya (dst) | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 270. | Recorder Display lainnya (dst) | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 271. | Uninterrupted Power Supply (UPS) | 2 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 272. | Coling Tower | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 273. | P.C Unit | 1 unit | Tahun 2003 | Rusak Berat |
| 274. | P.C Unit | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |

| | | | | |
|------|-----------|--------|------------|-------------|
| 275. | P.C Unit | 1 unit | Tahun 2007 | Baik |
| 276. | P.C Unit | 1 unit | Tahun 2007 | Baik |
| 277. | P.C Unit | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 278. | P.C Unit | 2 unit | Tahun 2010 | Baik |
| 279. | P.C Unit | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 280. | P.C Unit | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 281. | Lap Top | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 282. | Lap Top | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat |
| 283. | Lap Top | 3 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 284. | Lap Top | 1 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 285. | Lap Top | 1 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 286. | Lap Top | 1 unit | Tahun 2016 | Baik |
| 287. | Lap Top | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 288. | Note Book | 2 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 289. | Note Book | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 290. | Note Book | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 291. | Note Book | 1 unit | Tahun 2008 | Rusak Berat |
| 292. | Note Book | 1 unit | Tahun 2009 | Baik |
| 293. | Note Book | 1 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 294. | Note Book | 1 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 295. | Note Book | 1 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 296. | Note Book | 3 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 297. | Note Book | 1 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 298. | Note Book | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 299. | Hard Disk | 2 unit | Tahun 2019 | Rusak Berat |
| 300. | Note Book | 1 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 301. | Note Book | 1 unit | Tahun 2011 | Rusak Berat |
| 302. | Note Book | 3 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 303. | Note Book | 1 unit | Tahun 2014 | Baik |
| 304. | Note Book | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 305. | Hard Disk | 2 unit | Tahun 2019 | Rusak Berat |
| 306. | Scenner (Peralatan Mini Komputer) | 2 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 307. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 308. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 309. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 310. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 311. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 312. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 313. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat |
| 314. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 315. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2016 | Rusak Berat |
| 316. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 317. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 318. | Scenner (Peralatan Mini Komputer) | 2 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 319. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat |
| 320. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 321. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat |
| 322. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 323. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat |
| 324. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 325. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------------|-------------|----|
| 326. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2015 | Baik | 35 |
| 327. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2016 | Rusak Berat | |
| 328. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 329. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 330. | Scenner (Peralatan Mini Komputer) | 2 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 331. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2005 | Rusak Berat | |
| 332. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat | |
| 333. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2009 | Rusak Berat | |
| 334. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat | |
| 335. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2010 | Rusak Berat | |
| 336. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2011 | Baik | |
| 337. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat | |
| 338. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 339. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2016 | Rusak Berat | |
| 340. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 341. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 342. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 343. | Server | 1 unit | Tahun 2007 | Rusak Berat | |
| 344. | Server | 1 unit | Tahun 2008 | Kurang Baik | |
| 345. | Alat pelindung lainnya (dst) | 1 unit | Tahun 2011 | Baik | |
| 346. | Alat pelindung lainnya (dst) | 1 unit | Tahun 2011 | Baik | |

| | | | | | |
|------|--|--------|------------|-------------|----|
| 347. | Bangunan gedung kantor permanen | 1 unit | Tahun 2011 | Baik | 36 |
| 348. | Bangunan gedung kantor permanen | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 349. | Bangunan Gedung Tertutup Permanen | 1 unit | Tahun 2014 | Baik | |
| 350. | Bangunan Gedung Tertutup Permanen | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 351. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 3 unit | Tahun 1997 | Baik | |
| 352. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 1997 | Baik | |
| 353. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 1997 | Baik | |
| 354. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 1997 | Baik | |
| 355. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 1997 | Baik | |
| 356. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 357. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat | |
| 358. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 359. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2012 | Rusak Berat | |
| 360. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Rusak Berat | |
| 361. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Rusak Berat | |
| 362. | Gedung | 1 unit | Tahun 2013 | Rusak | |

| | | | | | |
|------|--|--------|------------|-------------|----|
| | Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | | | Berat | 37 |
| 363. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Rusak Berat | |
| 364. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 365. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Rusak Berat | |
| 366. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 367. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 368. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 369. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 370. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 371. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2014 | Baik | |
| 372. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2015 | Rusak Berat | |
| 373. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 374. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 375. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2016 | Baik | |
| 376. | Gedung | 1 unit | Tahun 2016 | Baik | |

| | | | | | |
|------|--|--------|------------|------|----|
| | Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | | | | 38 |
| 377. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2016 | Baik | |
| 378. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 2 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 379. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 380. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 381. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 382. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 383. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 384. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 385. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 386. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 387. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 388. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 389. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 390. | Gedung | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |

| | | | | | |
|------|---|--------|------------|-------------|----|
| | Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | | | | 39 |
| 391. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 392. | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |
| 393. | Bangunan Gedung Pertokoan (dst) | 2 unit | Tahun 2000 | Kurang Baik | |
| 394. | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 395. | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 396. | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 unit | Tahun 2013 | Baik | |
| 397. | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 unit | Tahun 2014 | Rusak Berat | |
| 398. | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 399. | Jalan Khusus lainnya | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 400. | Jalan Khusus lainnya | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |
| 401. | Jembatan Khusus Lainnya | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 402. | Jembatan Khusus lainnya | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 403. | Jembatan Penyebrangan Kendaraan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 404. | Jembatan Penyebrangan Lain-lain | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 405. | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 406. | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 407. | Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 408. | Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 409. | Sumur Gali (SGL) | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 410. | Sumur Gali (SGL) | 2 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 411. | Sumur Gali (SGL) | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |
| 412. | Sumur Gali (SGL) | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |

| | | | | |
|------|--|--------|------------|------|
| 413. | Sumur Gali (SGL) | 1 unit | Tahun 2020 | Baik |
| 414. | Sumur Resapan | 1 unit | Tahun 2013 | Baik |
| 415. | Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain | 1 unit | Tahun 2007 | Baik |
| 416. | Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain | 1 unit | Tahun 2009 | Baik |
| 417. | Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain | 1 unit | Tahun 2011 | Baik |
| 418. | Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 419. | Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain | 1 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 420. | Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 421. | Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA | 1 unit | Tahun 2017 | Baik |
| 422. | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 423. | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA | 1 unit | Tahun 2019 | Baik |
| 424. | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA | 1 unit | Tahun 2020 | Baik |
| 425. | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA | 1 unit | Tahun 2020 | Baik |
| 426. | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA | 1 unit | Tahun 2020 | Baik |
| 427. | Jaringan Distribusi Lain-lain | 8 unit | Tahun 2013 | Baik |
| 428. | Tanaman Keras | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 429. | Aset Renovasi | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 430. | Aset Renovasi | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 431. | Aset Renovasi | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 432. | Aset Renovasi | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 433. | Aset Renovasi | 1 unit | Tahun 2018 | Baik |
| 434. | Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2015 | Baik |
| 435. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 436. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |
| 437. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|------------|------|----|
| 438. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | 41 |
| 439. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 440. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 441. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 442. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 443. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 444. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2012 | Baik | |
| 445. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 2 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 446. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 447. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2015 | Baik | |
| 448. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 2 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 449. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 450. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 451. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 452. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 453. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 454. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 455. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2017 | Baik | |
| 456. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 3 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 457. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 3 unit | Tahun 2018 | Baik | |
| 458. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2018 | Baik | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|------------|------|----|
| 459. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | 42 |
| 460. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 461. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 462. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2019 | Baik | |
| 463. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |
| 464. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 3 unit | Tahun 2020 | Baik | |
| 465. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |
| 466. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |
| 467. | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 1 unit | Tahun 2020 | Baik | |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat bidang pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat pada dasarnya adalah memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Diantaranya melalui :

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Sosialisasi Pertauran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
3. Melakukan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala;



4. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi Berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan;
5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengesahan akta pendirian koperasi, legitimasi, dan pembubaran koperasi;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis dana manajemen bagi KUMKM;
7. Mengikutsertakan KUMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi baik tingkat lokal, regional dan nasional;
8. Pengembangan pola-pola kemitraan;
9. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
10. Peningkatan kegiatan ekspor sebagai upaya pengembangan perdagangan luar negeri, diantaranya adalah:
 - Identifikasi produk potensi ekspor untuk diikutsertakan pada promosi dagang/pameran;
 - Pemberian informasi mengenai prosedur dan tata cara ekspor/impor;
11. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha KUMKM;
12. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok dan barang strategis 1 (satu) minggu sekali pada hari senin. Pemantauan dilakukan di pasar-pasar tradisional kecamatan;
13. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
14. Pengawasan penggunaan alat UTTP dan pendampingan pelaksanaan siding tera ulang yang dilaksanakan oleh petugas kemetrolgian;
15. Pengawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan;
16. Pelaksanaan kegiatan bantuan paket sembako murah bagi masyarakat miskin dilaksanakan di 11 (sebelas) Kecamatan di wilayah Kabupaten



Luwu Timur pada bulan Ramadhan; dan penyelesaian pengaduan konsumen.

44

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur yang dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama dan indikator kinerja dalam Renstra periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24:



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Persentase Koperasi Aktif | | 61,64% | | 58,82% | 59,97% | 60,28% | 60,98% | 61,64% | 58,46% | 73,25% | 75,47% | 75,63% | 75,75% | 99,39 % | 122,14 % | 125,20 % | 124,02 % | 122,89 % |
| 2. | Persentase Non BPR/Aktif | | | | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| 3. | Persentase BPR LKM Aktif | | - | | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| 4. | Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM | | - | | - | - | - | - | - | 94,84% | 94,41% | 94,42% | 94,41% | 95,28% | - | - | - | - | - |
| 5. | Ekspor Bersih Perdagangan | | 700.000.000 US\$ | | 650.000.000 US\$ | 670.000.000 US\$ | 680.000.000 US\$ | 690.000.000 US\$ | 700.000.000 US\$ | 468.926.145,86 US\$ | 475.387.123,47 US\$ | 658.612.319,17 | 660.572.391,96 | 773.511.973,67. | 72,14 % | 70,95 % | 96,85 % | 95,74 % | 110,50% |
| 6. | Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal | | 23% | | 75% | 80% | 15% | 19% | 23% | 65,25% | 57,57% | 13,91% | 18,20% | 29,02% | 87,00 % | 71,96 % | 92,73 % | 95,79 % | 126,17% |
| 7. | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | | | | - | - | - | - | - | 40% | 41% | 42% | 43% | | - | - | - | - | - |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|---------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8. | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | | | | | | | | | 70% | 71% | 72% | 73% | | | | | | |
| 9. | Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.78 % | - | - | - | - | |
| 10. | Persentase fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | | | | |
| 11. | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.42 % | - | - | - | - | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|---------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12. | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,98 % | - | - | - | - | - |
| 13. | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 16. | Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 20. | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Rasio pertumbuhan wirausaha baru wilayah yang berskala kecil | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS) | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi sertifikat produk usaha | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 28. | Persentase jumlah UKM yang telah mandiri | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11,42% | 100% | 100% | 100% | 110% | 114,2% |
| 29. | Prestasi nilai SAKIP | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60,72% | 65,08% | 89,64% | 73,86% | 73,86% | 101,2% | 108,46% | 149,4% | 123,1% | 123,1% |
| 30. | Persentase wirausaha UKM yang baru | | | | - | 5,83% | 4,37% | 4,37% | 5,83% | - | 5,7% | 4,1% | 9,58% | 11,06 | - | 97,77% | 93,82% | 219,2% | 189,7% |
| 31. | Jumlah UMKM yang ditingkatkan kelas kemampuan lembaganya dari pemula ke lanjutan | | | | 10 UKM | 40 UKM | 20 UKM | 20 UKM | 20 UKM | 10 UKM | 35 UKM | 15 UKM | 24 UKM | 19 UKM | 100% | 87,5% | 75% | 120% | 95% |
| 32. | Persentase investasi dan kemitraan dengan perbankan/LKM | | | | 6% | 3,3% | 4,1% | - | - | 6,80% | 5,38% | 3,90% | - | - | 113,3% | 163,03% | 95,12% | - | - |
| 33. | Persentase koperasi yang meningkat statusnya dari kurang sehat menjadi sehat | | | | 22,92% | 24,65% | 25,88% | 28,17% | 28,17% | 18,84% | 23,8% | 26,08% | 28,98% | 28,98% | 82,19% | 96,55% | 91,66% | 102,87% | 102,87% |
| 34. | Persentase pengaduan konsumen dan tertib niaga yang ditindaklanjuti | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 35. | Persentase produk yang diekspor dan atau diperdagangkan antar pulau | | | | - | 60% | 70% | 85% | 90% | - | 90% | - | 85% | 100% | - | 150% | - | 100% | 111,11% |
| 36. | Persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan | | | | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 125% | 111,11% | 100% | 100% | - |
| 37. | Persentase gerobak dan perlengkapannya yang termanfaatkan | | | | - | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | | | | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------|--------|--------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 39. | Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi | | | | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 40. | Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu | | | | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - | - | 100% | - | 100% | - | - |
| 41. | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 9 orang | 9 orang | 10 orang | - | 100% | 90% | 90% | 100% | - |
| 42. | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | | | | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 43. | Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu | | | | - | 99% | 99% | 99% | 99% | - | 99% | 99% | 99% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 44. | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan | | | | 4 rekening | 6 rekening | 6 rekening | 5 rekening | 5 Rekening | 4 rekening | 6 rekening | 6 rekening | 5 rekening | 4 rekening | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 45. | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan | | | | - | 5 orang | - | - | - | - | 5 orang | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 46. | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda | | | | - | - | - | 1900 surat | 1900 surat | - | - | - | 1541 surat | 1736 surat | - | - | 81,10% | 91,36% | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------------------------|---------|------|--------|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 47. | Jumlah alat kebersihan kantor yang diadakan | | | | 19 jenis | 26 jenis | 28 jenis | 25 jenis | 25 jenis | 29 jenis | 26 jenis | 26 jenis | 25 jenis | 25 jenis | 152,60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan | | | | - | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 2 orang | - | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 2 orang | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48. | Jumlah peralatan kerja yang dipelihara | | | | 71 unit | 71 unit | 71 unit | 42 unit | 47 unit | 57 unit | 76 unit | 71 unit | 30 unit | 46 unit | 80,28% | 109,86% | 100% | 71,42% | 90% |
| 49. | Persentase terpenuhinya penunjang administrasi kesekretariatan SKPD | | | | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 50. | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | | | | - | - | - | 34 jenis | 40 jenis | - | - | - | 34 jenis | 37 jenis | - | - | - | 100% | 92,5% |
| 51. | Jumlah penggandaan yang tersedia | | | | - | - | - | 21000 lembar | 21000 lembar | - | - | - | 19584 lembar | 19979 lembar | - | - | - | 93,25% | 95,13% |
| | Jumlah bahan jilid yang tersedia | | | | - | - | - | 300 exemplar | 200 lembar | - | - | - | 180 exemplar | 200 lembar | - | - | - | 60% | 100% |
| | Jumlah bahan cetakan yang tersedia | | | | - | - | - | 3 jenis | 2 jenis | - | - | - | 3 jenis | 2 jenis | - | - | - | 100% | 100% |
| 52. | Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia | | | | 10 jenis | 12 jenis | 12 jenis | 10 jenis | 10 jenis | 15 jenis | 12 jenis | 12 jenis | 10 jenis | 9 jenis | 150% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 53. | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | | | | - | - | - | 716 kotak | 590 kotak | - | - | - | 716 kotak | 590 kotak | - | - | - | 100% | 100% |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 54. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | | | | 60 exemplar | 72 exemplar | 1680 exemplar | 1680 exemplar | 1680 exemplar | 60 exemplar | 60 exemplar | 1680 exemplar | 1680 exemplar | 1680x exemplar | 100% | 83,33% | 100% | 100% | 100% |
| 55. | Jumlah BBM genset yang disediakan | | | | - | - | - | 50 liter | 60 liter | - | - | - | 50 liter | 60 liter | - | - | - | 100% | 100% |
| 56. | Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan | | | | 46 kali | 61 kali | 67 kali | 99 kali | 38 kali | 81 kali | 94 kali | 109 kali | 99 kali | 38 kali | 176% | 154,10% | 162,68% | 100% | 100% |
| 57. | Jumlah tenaga pendukung/administrasi teknis yang terbayarkan | | | | 7 orang | 6 orang | 6 orang | 9 orang | 10 orang | 7 orang | 6 orang | 6 orang | 9 orang | 10 orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 58. | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 59. | Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan | | | | - | 90 kali | 172 kali | 243 kali | 245 kali | - | 105 kali | 190 kali | 147 kali | 235 kali | - | 116,67% | 110,46% | 60,49% | 95,91%% |
| 60. | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | | | | - | 1 unit | 2 unit | - | - | - | 1 unit | 2 unit | - | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 61. | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | | | | 19 unit | 18 unit | 6 unit | 8 unit | | 19 unit | 18 unit | 6 unit | 8 unit | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 62. | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | | | | - | 3 unit | - | - | - | - | 3 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 63. | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | | 7 unit | 8 unit | 8 unit | 7 unit | | 5 unit | 8 unit | 8 unit | 7 unit | | 71% | 100% | 100% | 100% | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 64. | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | 4 gedung | 3 gedung | 4 gedung | 1 gedung | - | 1 gedung | 2 gedung | 4 gedung | 1 gedung | - | 25% | 66,67 % | 100 % | 100 % | - |
| 65. | Cakupan luas kantor yang direhab | | | | 100% | - | - | 70% | 70% | 100% | - | - | 70% | 70% | 100 % | - | - | 100 % | 100 % |
| 66. | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bimtek, workshop, seminar perundang-undangan | | | | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | - | 16 orang | 18 orang | 10 orang | 10 orang | - | 160 % | 180 % | 100 % | 100 % | - |
| 67. | Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu | | | | - | - | 29 orang | - | - | - | - | 29 orang | - | - | - | - | 100 % | - | - |
| 68. | Jumla pakaian dinas pegawai | | | | 29 orang | - | - | - | - | 29 orang | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - |
| 69. | Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun | | | | - | - | - | 3 dokumen | 3 dokumen | - | - | - | 3 dokumen | 3 dokumen | - | - | - | 100 % | 100 % |
| 70. | Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun | | | | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 71. | Jumlah dokumen ikhtisar perencanaan yang di susun | | | | - | - | 4 dokumen | - | - | - | - | 4 dokumen | - | - | - | - | 4 dokumen | - | - |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 72. | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun | | | | - | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | - | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 73. | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan audit | | | | 21 koperasi | 15 koperasi | 15 koperasi | 15 koperasi | - | 21 koperasi | 15 koperasi | 15 koperasi | 15 koperasi | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 74. | Jumlah koperasi yang mengikuti manajemen pengelolaan koperasi | | | | - | 15 koperasi | - | 15 koperasi | - | - | 15 koperasi | - | 15 koperasi | - | - | 100% | - | 100% | - |
| 75. | Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengelolaan koperasi | | | | - | - | - | 15 koperasi | - | - | - | - | 15 koperasi | - | - | - | - | 100% | - |
| 76. | Jumlah koperasi yang dibina | | | | 53 koperasi | 81 koperasi | 120 koperasi | 157 koperasi | 156 koperasi | 53 koperasi | 85 koperasi | 127 koperasi | 157 koperasi | 156 koperasi | 100% | 104,94% | 105% | 100% | 100% |
| 77. | Jumlah UKM yang telah terdata | | | | - | 3000 UKM | 4000 UKM | 4000 UKM | 3000 UKM | - | 2285 UKM | 3160 UKM | 5501 UKM | 3220 UKM | - | 76,17% | 96,10% | 137,52% | 107,33% |
| 78. | Jumlah KUKM yang terfasilitasi halal, desain produk dan merk dagang | | | | 7 UKM | 10 UKM | 21 UKM | 25 UKM | 35 UKM | 7 UKM | 9 UKM | 21 UKM | 25 UKM | 35 UKM | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 79. | Jumlah UKM yang dilatih | | | | 50 UKM | 200 UKM | 100 UKM | 100 UKM | 70 UKM | 50 UKM | 200 UKM | 100 UKM | 100 UKM | 70 UKM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 80. | Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi HAKI | | | | - | 25 UKM | 30 UKM | 35 UKM | - | - | 25 UKM | 30 UKM | 35 UKM | - | - | 100% | 100% | 100% | - |
| 81. | Jumlah UKM yang mendapat pengawasan terhadap penggunaan dana KUR | | | | - | 100 UKM | 125 UKM | - | - | - | 123 UKM | 125 UKM | - | - | - | 123% | 100% | - | - |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kinerja SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------------------------|-------|----------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 82. | Jumlah produk UKM yang dipromosikan | | | | 11 produk | 11 produk | 11 produk | 10 produk | - | 11 produk | 11 produk | 16 produk | 10 produk | - | 100 % | 100 % | 145,45 % | 100 % | - |
| 83. | Jumlah paket pasar murah yang tersalurkan | | | | 3200 paket | 3300 paket | 3400 paket | 3500 RTM | 9565 RTM | 3200 paket | 3300 paket | 3400 paket | 3500 RTM | 9565 RTM | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 84. | Persentase temuan pengawasan yang ditindaklanjuti | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 85. | Persentase alat UTTP yang akurat | | | | 90% | 50% | 85% | 90% | 90% | 98,23 % | 39% | 85,75 % | 85,19 % | 70,13 % | 109,14% | 78% | 100,92% | 94,65 % | 77,92 % |
| 86. | Jumlah pasar rakyat yang dibangun | | | | 6 pasar | 3 pasar | 5 pasar | 2 pasar | - | 6 pasar | 3 pasar | 5 pasar | 2 pasar | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
| 87. | Jumlah informasi jurnal harga dari kecamatan | | | | 132 jurnal | 132 jurnal | 132 jurnal | 132 Jurnal | 132 jurnal | 132 jurnal | 132 jurnal | 132 jurnal | 132 jurnal | 132 jurnal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 88. | Jumlah buku produk potensi unggulan daerah | | | | - | 20 buku | - | 20 buku | 10 buku | - | 20 buku | - | 20 buku | 10 buku | - | 100 % | - | 100 % | 100 % |
| 89. | Jumlah pelaku usaha yang mengetahui prosedur dan dokumen kegiatan ekspor/impor | | | | - | - | - | 25 badan usaha | - | - | - | - | 25 badan usaha | - | - | - | - | 100 % | - |



Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Luwu Timur
 Tahun 2016 s/d Tahun 2020

| Uraian | Anggaran SKPD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| PENDAPATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gaji dan Tunjangan | 1.405.020.366,00 | 1.332.498.793,00 | 1.275.134.341,00 | 1.471.379.495,00 | 1.505.885.065,00 | 1.370.817.199,00 | 1.301.922.821,00 | 1.271.862.181,00 | 1.448.724.675,00 | 1.498.293.196,00 | 97,56% | 97,70% | 99,74% | 98,46% | 99,52% | 8,27% | 10% |
| - Tambahan Penghasilan PNS | 622.524.000,00 | 608.215.000,00 | 853.702.000,00 | 902.946.000,00 | 846.048.000,00 | 620.188.993,00 | 607.163.700,00 | 845.335.000,00 | 902.125.395,00 | 793.223.400,00 | 99,62% | 99,82% | 99,01% | 99,90% | 93,75% | 9,38% | 7,94% |
| BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44.400.000,00 | 70.800.000,00 | 69.120.000,00 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 41.991.414,00 | 61.862.119,00 | 60.639.163 | 60.781.895,00 | 52.337.073,00 | 94,57% | 87,37% | 87,73% | 92,09% | 79,29% | 16% | 7,92% |
| - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | - | 44.990.000,00 | - | - | - | - | 44.990.000,00 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - |
| - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.140.000,00 | 27.300.000,00 | 27.379.000 | 27.379.000,00 | 27.379.000,00 | 3.014.000,00 | 22.289.000,00 | 27.375.000 | 27.379.000,00 | 27.314.000 | 95,99% | 81,64% | 99,99% | 100% | 99,76% | 192,43% | 165,53% |

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----|----------|
| - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 15.575.000,00 | 16.000.000,00 | 16.400.000 | 18.100.000,00 | 17.550.000,00 | 13.335.000,00 | 15.980.000,00 | 16.400.000 | 17.665.000,00 | 17.490.000,00 | 85,62 % | 99,88 % | 100 % | 97,60 % | 99,66 % | 3,14 % | 58 | 7,30 % |
| - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.724.000,00 | 2.442.000,00 | 2.479.500 | 2.420.000,00 | 2.489.000,00 | 68,96 % | 97,68 % | 99,18 % | 96,80 % | 99,56 % | - | | 10,91 % |
| - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | 6.240.000 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 5.135.000,00 | 4.640.000,00 | 4.800.000 | 6.120.000,00 | 6.120.000,00 | 84,74 % | 76,57 % | 76,92 % | 68,08 % | 68,08 % | 0,74 % | | 5,33 % |
| - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 229.762.000,00 | 405.180.000,00 | 391.860.000 | 620.160.000,00 | 236.020.000,00 | 229.733.800,00 | 405.135.159,00 | 391.722.547 | 618.622.823,00 | 235.553.030,00 | 99,99 % | 99,99 % | 99,96 % | 99,75 % | 99,80 % | 17,34 % | | 17,26 % |
| - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis | 108.000.000,00 | 90.000.000,00 | - | 132.000.000,00 | 144.000.000,00 | 106.000.000,00 | 89.000.000,00 | - | 127.000.000,00 | 143.000.000,00 | 98,15 % | 98,89 % | - | 96,21 % | 99,31 % | -26,89 % | | -25,86 % |
| - Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD | 102.409.000,00 | 48.625.000,00 | 40.000.000 | - | - | 98.429.100,00 | 47.911.600,00 | 39.143.000 | - | - | 96,11 % | 98,53 % | 97,86 % | - | - | -17,56 % | | -17,41 % |
| - Monitoring dan Evaluasi | 85.110.000,00 | 101.731.000,00 | 60.126.000 | 64.866.000,00 | 33.205.000,00 | 85.045.100,00 | 101.500.550,00 | 59.826.400 | 64.528.900,00 | 33.178.350,00 | 99,92 % | 99,77 % | 99,50 % | 99,48 % | 99,42 % | -15,57 % | | -15,61 % |
| - Kunjungan Kerja Dalam Daerah | - | 30.780.000,00 | 40.608.000 | 58.230.000,00 | 58.230.000,00 | - | 30.622.000,00 | 40.312.500 | 57.982.900,00 | 58.069.750,00 | - | 99,49 % | 99,27 % | 99,58 % | 99,72 % | 18,83 % | | 18,91 % |
| - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 840.000,00 | 799.000,00 | - | - | - | 794.000,00 | 799.000,00 | - | - | - | 94,52 % | 100 % | -1,22 % | | 0,16 % |
| - Penyediaan Alat Tulis Perkantoran | - | - | - | 41.440.000,00 | 23.068.000,00 | - | - | - | 41.175.000,00 | 23.059.000,00 | - | - | - | 99,36 % | 99,96 % | -11,08 % | | -11 % |
| - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | - | 12.894.000,00 | 15.000.000,00 | - | - | - | 10.687.750,00 | 14.914.750,00 | - | - | - | 82,89 % | 99,43 % | 4,08 % | | 9,85 % |
| - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | - | - | 375.000,00 | 450.000,00 | - | - | - | 371.200,00 | 445.050,00 | - | - | - | 98,99 % | 98,90 % | 5% | | 4,97 % |
| - Penyediaan Makanan dan Minuman | - | - | - | 12.060.000,00 | 10.335.000,00 | - | - | - | 11.934.000,00 | 10.203.000,00 | - | - | - | 98,96 % | 98,72 % | -3,58 % | | -3,63 % |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----|----------|
| - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 159.053.450,00 | 101.600.000,00 | 33.750.850 | 62.016.500,00 | 0,00 | 159.050.450,00 | 99.849.730,00 | 32.175.850 | 61.238.100,00 | 0,00 | 100 % | 98,28 % | 95,33 % | 98,74 % | - | -29,79 % | 59 | -28,67 % |
| - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 14.250.000,00 | 39.975.000,00 | 20.000.000 | 16.000.000,00 | 0,00 | 8.903.000,00 | 37.238.000,00 | 19.988.000 | 15.874.000,00 | 0,00 | 62,48 % | 93,15 % | 99,94 % | 99,21 % | - | 2,64 % | | 37,84 % |
| - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 40.640.000,00 | 41.200.000,00 | 35.000.000 | 41.500.000,00 | 20.700.000,00 | 25.720.000,00 | 32.124.480,00 | 31.474.654 | 35.698.438,00 | 20.385.000,00 | 63,29 % | 77,97 % | 89,93 % | 86,02 % | 98,48 % | -11,30 % | | -1,60 % |
| - Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor | 7.495.000,00 | - | - | 534.593.000,00 | 24.545.454,50 | 7.495.000,00 | - | - | 500.364.635,50 | 24.545.454,50 | 100 % | - | - | 93,60 % | 100 % | -48,85 % | | -48,77 % |
| - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - | 17.442.000,00 | 43.860.000 | - | 0,00 | - | 17.442.000,00 | 38.278.400 | - | 0,00 | - | 100 % | 87,27 % | - | - | 37,87 % | | 29,87 % |
| - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | - | 150.800.000,00 | - | - | - | - | 135.350.000,00 | - | - | - | - | 89,75 % | - | - | - | -25 % | | -25 % |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 16.040.000,00 | - | - | - | - | 16.040.000,00 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - |
| - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | - | - | 7.250.000 | - | - | - | - | 7.250.000 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang | 63.000.000,00 | 65.000.000,00 | 54.000.000 | 4.000.000,00 | 0,00 | 56.366.300,00 | 53.316.212,00 | 47.794.320 | 3.972.500,00 | 0,00 | 89,47 % | 98,73 % | 88,51 % | 99,31 % | 0 | -51,59 % | | -51,86 % |
| PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHAUSAHA KECIL MENENGAH DAN KONDUSIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| - Peningkatan Kerjasama Bidang Haki | 54.348.000,00 | 84.865.000,00 | 100.670.000 | - | - | 54.220.000,00 | 57.523.400,00 | 95.940.000 | - | - | 99,76 % | 67,78 % | 95,30 % | - | - | -6,31 % | -6,78 % |
| - Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah | - | 58.315.000,00 | 72.895.000 | - | - | - | 57.087.000,00 | 71.940.000 | - | - | - | 97,84 % | 98,69 % | - | - | -18,75 % | -18,50 % |
| - Pengembangan dan Pemutakhiran Data Usaha Kecil dan Menengah | - | - | - | 73.171.000,00 | 60.090.000,00 | - | - | - | 70.960.000,00 | 55.925.000,00 | - | - | - | 96,98 % | 98,69 % | -4,47 % | -5,30 % |
| - Pendampingan Haki Bagi Usaha Kecil dan Menengah | - | - | - | 170.152.000,00 | 77.940.000,00 | - | - | - | 158.387.000,00 | 73.445.000,00 | - | - | - | 93,09 % | 94,23 % | -13,55 % | -13,41 % |
| - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah | - | - | - | 608.815.000,00 | 0,00 | - | - | - | 538.265.478,00 | 0,00 | - | - | - | 88,41 % | - | -25 % | -25 % |
| - Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah | - | 8.415.000,00 | - | - | - | - | 7.757.000,00 | - | - | - | - | 92,18 % | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | 92.971.000,00 | 320.605.000,00 | 147.817.500 | 215.548.000,00 | 151.858.000,00 | 92.951.000,00 | 318.413.000,00 | 136.527.000 | 210.683.000,00 | 142.681.000,00 | 99,98 % | 99,32 % | 92,36 % | 97,74 % | 93,96 % | 51,81 % | 51,87 % |
| - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD | - | 78.493.000,00 | 80.565.000 | - | - | - | 73.665.000,00 | 80.225.000 | - | - | - | 93,85 % | 99,58 % | - | - | -24,34 % | -22,77 % |
| - Sosialisasi Haki Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah | - | 26.472.000,00 | 27.802.000 | 29.190.000,00 | 14.495.000,00 | - | 26.070.000,00 | 27.462.000 | 26.090.000,00 | 12.835.000,00 | - | 98,48 % | 98,78 % | 89,38 % | 88,55 % | -10,08 % | -12,62 % |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
| MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah | 252.066.000,00 | 385.195.000,00 | 417.780.000 | - | - | 246.577.700,00 | 343.110.600,00 | 400.922.500 | -- | - | 97,82 % | 89,07 % | 95,96 % | - | - | -9,68 % | -11 | |
| - Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | - | 20.060.000,00 | 15.995.000 | - | - | - | 19.757.000,00 | 15.610.000 | - | - | - | 98,99 % | 97,59 % | - | - | -30,07 % | -30,25 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 4.451.750 | - | - | - | - | 4.158.000 | - | - | - | - | 93,40 % | - | - | -25 % | -25 % | |
| - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun | - | - | - | - | 4.000.000,00 | - | - | - | - | 4.000.000,00 | - | - | - | - | 100 % | - | - | |
| - Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | - | 3.685.000,00 | 2.121.000 | 10.000.000,00 | 4.320.000,00 | - | 3.685.000,00 | 2.052.000 | 8.310.000,00 | 4.300.000,00 | - | 100 % | 96,75 % | 83,10 % | 99,54 % | 68,05 % | 53,10 % | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD | - | 10.000.000,00 | 8.749.000 | 20.000.000,00 | 3.600.000,00 | - | 8.386.000,00 | 6.438.750 | 18.265.100,00 | 3.600.000,00 | - | 83,86 % | 73,59 % | 91,33 % | 100 % | 8,52 % | 20,04 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
| KELEMBAGAAN KOPERASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | 23.232.000,00 | 32.095.000,00 | 78.620.00 | 165.300.000,00 | 65.450.000,00 | 21.525.200,00 | 29.075.000,00 | 77.792.00 | 164.157.200,00 | 65.165.000,00 | 92,65 % | 90,59 % | 98,95 % | 99,31 % | 99,56 % | 58,24 % | 63,34 % | |
| - Pelatihan Audit Bagi Pengawas Koperasi | 95.727.000,00 | 50.990.000,00 | 72.740.00 | 80.760.000,00 | 0,00 | 90.856.800,00 | 49.045.000,00 | 72.325.00 | 80.100.000,00 | 0,00 | 94,91 % | 96,19 % | 99,43 % | 99,18 % | - | -23,23 % | -21,95 % | |
| - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD | - | - | - | 127.015.000,00 | 0,00 | - | - | - | 124.202.000,00 | 0,00 | - | - | - | 97,79 % | - | -25 % | -25 % | |
| - Bimbingan Teknis Penilaian KSP/USP Koperasi | - | - | - | 71.665.000,00 | 16.215.000,00 | - | - | - | 70.411.000,00 | 16.215.000,00 | - | - | - | 98,25 % | 100 % | -19,34 % | -19,24 % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fasilitas Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen | 264.785.000,00 | 291.819.000,00 | 348.470.000 | - | - | 262.462.200,00 | 282.984.000,00 | 340.623.000 | - | - | 99,12 % | 96,97 % | 97,75 % | - | - | -17,59 % | -17,95 % | |
| - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | 23.284.000,00 | 39.335.000,00 | 48.480.00 | 73.420.000,00 | 32.345.000,00 | 18.784.000,00 | 32.258.600,00 | 41.700.00 | 62.650.000,00 | 31.887.900,00 | 80,67 % | 82,01 % | 86,01 % | 85,33 % | 98,59 % | 21,92 % | 25,54 % | |
| - Oprasionalisasi dan Pengembangan Kemetrollogian Daerah | 14.413.100,00 | 42.731.000,00 | 633.075.200 | 1.398.289.471,96 | 28.146.500,00 | 12.594.800,00 | 40.223.200,00 | 597.264.509 | 1.380.107.771,96 | 27.936.700,00 | 87,38 % | 94,13 % | 94,34 % | 98,70 % | 99,25 % | 400,22 % | 409,33 % | |
| - Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar | 32.119.000,00 | - | - | - | - | 29.242.300,00 | - | - | - | - | 91,04 % | - | - | - | - | -25 % | -25 % | |
| - Optimalisasi Operasi Pasar | - | - | - | 360.000.000,00 | 1.408.485.000,00 | - | - | - | 357.303.000,00 | 1.380.508.750,00 | - | - | - | 99,25 % | 98,01 % | 72,81 % | 71,59 % | |
| - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | - | - | - | 79.974.500,00 | 81.150.000,00 | - | - | - | 78.509.500,00 | 81.039.500,00 | - | - | - | 98,17 % | 99,86 % | 0,37 % | 0,81 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
| PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor | - | 98.600.000,00 | - | 33.608.750,00 | 4.260.000,00 | - | 84.977.000,00 | - | 32.208.750,00 | 3.530.000,00 | - | 86,18 % | - | 95,83 % | 82,86 % | -46,83 % | -47,26 % | |
| - Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan | - | 23.290.000,00 | - | 36.738.000,00 | 12.795.000,00 | - | 21.130.000,00 | - | 36.508.000,00 | 12.720.000,00 | - | 90,73 % | - | 99,37 % | 99,41 % | -41,29 % | -41,29 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional | 30.378.000,00 | 37.933.000,00 | 32.407.000 | - | - | 27.650.100,00 | 29.606.500,00 | 30.915.500 | - | - | 91,02 % | 78,05% | 95,40 % | - | - | -22,42 % | -22,13 % | |
| - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk | 7.952.065.700,00 | 4.763.987.500,00 | 7.938.572.220.16 | 9.176.178.066,80 | 1.319.881.788,00 | 7.396.995.000,00 | 4.588.396.200,00 | 7.566.051.899.60 | 8.693.657.266,15 | 1.300.205.572,90 | 93,02 % | 96,31 % | 95,31 % | 94,74 % | 98,51 % | -10,87 % | -10,87 % | |
| - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 48.704.400,00 | 73.588.000,00 | 78.053.000 | - | - | 48.297.400,00 | 73.154.000,00 | 77.290.000 | - | - | 99,16 % | 99,41 % | 99,02 % | - | - | -10,71 % | -10,72 % | |
| - Bimbingan Teknis Pemasaran Produk dan Pengelolaan Pasar | 41.004.000,00 | - | - | - | - | 35.739.500,00 | - | - | - | - | 87,08 % | - | - | - | - | -25 % | -25 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan | 0,00 | 30.000.000,00 | - | - | - | 0,00 | 29.800.000,00 | - | - | - | - | 99,33 % | - | - | - | - | - | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

64

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur, mempunyai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan Koperasi, UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Luwu Timur. Program tersebut menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan pada periode lima tahun mendatang.

2.4.1 Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi, UMKM dan Perdagangan

1. Koperasi telah memiliki Badan Hukum yang bisa setara dengan badan usaha lainnya dalam pengembangan usaha.
2. Pengelolaan koperasi dan segala aktifitas usaha yang dilakukan di lindungi oleh hukum dan undang-undang memungkinkan pengelola untuk berinovasi dan berkreasi terhadap perkembangan koperasi.
3. Struktur koperasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan koperasi.
4. Kepengurusan yang demokratis karena anggota mempunyai hak dan suara yang sama.
5. Dapat mengelola lebih dari pada satu usaha.
6. Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masih terdayaguna secara produktif dalam kegiatan berusaha.
7. Potensi pasar dalam negeri yang terus berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk.
8. Dukungan ketersediaan bahan baku yang murah dan berlimpah.
9. Semakin pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara terutama dalam konteks ASEAN.
10. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat menunjang dinamisasi kegiatan bisnis dan juga menunjang akses pasar secara cepat dan luas.



11. Meningkatnya kesadaran komitmen dan keberpihakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan arti pentingnya UMKM dalam perekonomian.
12. Terdapat pasar tradisional yang dapat dijadikan pusat perdagangan tingkat kabupaten (pasar buah dan sayur).
13. Pengembangan pujasera dalam rangka memperluas akses pedagang kakilima dan UMKM.
14. Ketika relokasi pedagang, ada tempat transaksi selama konstruksi.
15. Lokasi pasar yang strategis.
16. Pasar yang sudah dibangun berkualitas baik.
17. Terdapat asset pasar yang sudah bersertifikat.
18. Terdapat ASN yang dapat dilatih menjadi PPNS Kemetrolgian.
19. Terdapat pasar yang dapat dikelola.

2.4.2 Tantangan Pengembangan Pelayanan Koperasi, UMKM dan Perdagangan

1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mendirikan, bergabung dan menyimpan uangnya di koperasi masih sangat rendah.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi baik dalam pengelolaan usaha maupun penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi.
3. Sulitnya mengakses permodalan pada sektor perbankan untuk menutupi kurangnya permodalan di koperasi berdampak pada keterbatasan modal yang dimiliki oleh koperasi dalam pengelolaan usaha.
4. Masih rendahnya mutu produk UMKM menyebabkan rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan UMKM.



5. Persaingan bisnis UMKM yang semakin ketat dengan banyaknya muncul produk dan inovasi baru yang didukung oleh teknologi.
6. Perkembangan teknologi E Commerce sudah masuk dan merambah kesemua sektor usaha termasuk UMKM
7. Rendahnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku UMKM lokal akibat kurangnya komitmen penegakan etika bisnis
8. Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum, sehingga semakin terdesaknya UMKM oleh usaha besar yang agresif memasuki wilayah usaha yang sepantasnya diperuntukkan bagi UMKM.
9. adanya peluang untuk pemasok dan pelanggan baru ketika pasar baru hendak dibangun.
10. pemanfaatan pasar jadi lebih optimal dan menumbuhkan wirausaha baru.
11. Semakin meningkatnya masyarakat menjadikan Pasar Rakyat sebagai tempat untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
12. Makin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.
13. Pengelolaan pasar sesuai standar SNI Pasar Rakyat.
14. Besarnya peluang menjadi kabupaten sebagai daerah tertib ukur, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan uji alat UTTP (alat ukur, takar, timbang dan perangkat lainnya) di pasar-pasar dan perusahaan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan data keadaan perkembangan bidang perdagangan, koperasi, dan umkm maka dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM.
 2. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.
 3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.
 4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajelala yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
 5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM

6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.
- b. Bidang Perdagangan :
1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah.
 2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.
 3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
 4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan ekspor dan impor .
- c. Bidang Perindustrian :
1. Masih rendahnya produktifitasi IKM.
 2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM.
 3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM.
 4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah “**Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya**” **Berkelanjutan** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut

dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari berkelanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya.

Lebih maju mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 6 (enam) misi utama sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh**

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna kesejahteraan social. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di dalamnya tercakup upaya umum untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor perekonomian unggulan daerah serta hilirisasi atas produk-produk tersebut, dibarengi dengan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata pada seluruh wilayah.

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola



pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan publik lainnya.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketentraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah. Di dalam upaya ini, penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ditempatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mendukung 2 (dua) misi yaitu :

| | |
|--|---|
| <p>Misi II : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas</p> | <p>Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan</p> <p>Sasaran IV: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan</p> |
|--|---|

| | | |
|--|---|----|
| | daerah | 72 |
| Misi IV : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik | <p>Tujuan IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani</p> <p>Sasaran VIII : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan</p> | |

Tabel 3.2.1

Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terkait Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| Misi II | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan II | Sasaran IV | Strategi IV | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah | Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah | Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat - Pengembangan kapasitas SDM, manajemen, dan permodalan koperasi dan UMKM - Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital - Penguatan sarana/prasarana perdagangan dalam negeri dan ekspor - Perluasan dan peningkatan skala industri manufaktur |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk SDA - Penguatan sarana/prasarana perdagangan dalam negeri dan ekspor |
| Misi IV | | | |
| Tujuan IV | Sasaran VIII | Strategi VIII | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keuangan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis jabatan fungsional dan optimalisasi organisasi - Pemantapan kinerja tata kelola keuangan - Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja berbasis elektronik - Modernisasi sistem pengelolaan arsip - Modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset |



3.3 Telaahan Renstra Kementerian K/L dan Renstra SKPD Propinsi

74

a. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI

Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan visi Presiden RI yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”***

Visi Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 yaitu “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Tujuan Kementerian Perdagangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Kementerian Perdagangan menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bapakting;
3. Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggungjawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya perana PBK, SRG, dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional;
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.



e. Telaahan Renstra Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan

75

Dinas Perdagangan dalam mewujudkan visi Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu "***Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter***

Tujuan Dinas Perdagangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2023), yaitu :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah;
2. Peningkatan kinerja ekspor non-migas;
3. Peningkatan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dinas Perdagangan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2023), yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dengan mengarahkan pada pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya kinerja ekspor non migas;
3. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
4. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab.

c. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

Kementerian Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan visi Presiden RI yaitu "***Terwujudnya Indonesia yang Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.***



Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang mencakup penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha besar mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui akses permodalan, peningkatan kapasitas serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

d. Telaahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Selatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan visi Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu ***"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"***



Maksud, tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi dan UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, visi misi Gubernur Sulawesi Selatan beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 tahun kedepan.

Maksud dari pembinaan Koperasi dan UKM adalah mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan dayadorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah, melalui fasilitasi kegiatan usaha yang berorientasi bisnis.

Adapun tujuan pembinaan adalah:

1. Teridentifikasi, terfasilitasi dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang Koperasi dan UKM guna menjamin keberlangsungan proses bisnis secara profesional.
2. Meningkatkan kemampuan memasarkan produk yang telah memenuhi standar dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki guna meningkatkan derajat daya saing dibidang Koperasi dan UKM.
3. Meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memperluas permodalan, serta kemitraan usaha.
4. Meningkatkan ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar.
5. Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha.



Melalui tujuan tersebut, dikembangkanlah sasaran-sasaran beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis.

Pengelolaan Usaha Koperasi, UKM dilakukan agar tercipta produktifitas keluaran yang mampu berdaya saing secara lokal, regional dan internasional sesuai dengan entitas bisnis dan adanya kesetaraan iklim usaha bagi semua pelaku usaha secara proporsional demi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar.

Optimalisasi pemasaran produk ke pasar yang lebih tinggi membutuhkan berbagai upaya dan terobosan agar mampu sinergis dengan persyaratan yang ditetapkan, permintaan pasar dan tentunya spesifikasi konsumen.

3. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki).

Tersedianya sumberdaya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi menjadi prasyarat utama meningkatkan daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional.

e. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi Presiden RI yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*



Visi Kementerian Perindustrian periode 2020-2024 yaitu "Pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah :

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan.

d. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan

Dinas Perindustrian dalam mewujudkan visi Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu "***Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter***

Isu-isu strategis dinas perindustrian dijabarkan sebagai berikut :



1. Pengembangan industri di 24 kabupaten/kota yang berbasis sumber daya lokal
2. Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, inovasi produk lokal dan sistem produksi industri untuk meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah

3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 15 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar Provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kabupaten Luwu



Timur, diantaranya pengembangan **Kawasan Budidaya** yang meliputi :

1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :
 - a. Menetapkan kawasan budidaya yang bernilai strategis Kabupaten Luwu Timur untuk memanfaatkan sumber daya alam di darat dan dilaut untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan didalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat.
 - c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur
2. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Memberikan arahan dalam menentukan prioritas pemanfaatan ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan.
4. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Aset pengembangan di masa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat

dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan, dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46% dari total luas Kabupaten Luwu Timur.

3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.
5. Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb.

Sedangkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan Produksi;
- 2. Kawasan Peruntukan Pertanian;**

- a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur dikembangkan seluas 27.709,50 Ha, meliputi; Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kalena, Malili, Mangkutana, Nuha, Tomoni Timur, Towuti, Wasuponda dan Wotu.

- b. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pengembangan kawasan

perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan.

Berdasarkan komoditas yang sudah berkembang dan kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan serta potensi pasar terhadap hasil perkebunan maka komoditas tanaman perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur meliputi perkebunan sawit, perkebunan kelapa, perkebunan lada, dan perkebunan sagu.

c. Kawasan Hortikultura

Pertanian hortikultura yang tumbuh di Kabupaten Luwu Timur adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, kacang dan sagu.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan
4. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi
- 5. Kawasan Peruntukan Industri**

Kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan perindustrian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan perindustrian yakni sebagai berikut :

- Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
- Tersedia sistem air baku yang cukup;
- Adanya sistem pembuangan limbah;
- Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat; dan



- Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Tujuan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya;
2. Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruangnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur diintegrasikan dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur meliputi kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah.

a. Kawasan Industri

Rencana kawasan industri lampia di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan kawasan industri yang memiliki luas yang sudah dibebaskan mencapai 36,33 Ha. Kawasan Industri Lampia merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri pengolahan dan manufaktur.

b. Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan 10 kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, sesuai karakteristik dan komoditas unggulan di wilayahnya seperti pertanian, pariwisata, industri, UMKM, hingga peternakan.



1. Kecamatan Nuha, pengembangan Kawasan Wisata yang terdiri 4 desa yaitu Desa Nuha, Desa Sorowako, Desa Nikkel dan Kelurahan Magani.
 2. Kecamatan Towuti, Kawasan Pertanian Terpadu yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Mahalona, Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, Desa Tole, dan Desa Buangin.
 3. Kawasan Agro Industri, Perkebunan Lada yang terdiri 5 desa yaitu Desa Tokalimbo, Desa Loeha, Desa Ranteangin, Desa Bantilang, dan Desa Masiku.
 4. Kawasan Perdagangan, dan Industri Olahan Komoditas, terdiri dari 5 desa yaitu Desa Asuli, Desa Wawondula, Desa Lioka, Desa Baruga dan Desa Langkea Raya.
 5. Kawasan Peternakan dan Penunjang, terdiri dari 3 desa yaitu Desa Pekaloo, Desa Matompi, Desa Timampu, Kecamatan Wasuponda.
 6. Kawasan Peternakan dan Pengolahan, hasil Hutan Non-Kayu terdiri dari 3 desa yaitu Desa Kawata, Desa Parumpanai, dan Desa Matano (Kec. Nuha).
 7. Kawasan Agrowisata 4 desa meliputi: Desa Wasuponda, Desa Ledu-Ledu, Desa Balambano, Desa Tabarano, Kecamatan Malili.
 8. Kawasan Pesisir dan Industri Olahan Hasil Laut terdiri dari 4 desa yaitu Desa Harapan, Desa Pasi-Pasi, Desa Wewangriu, Desa Balantang.
 9. Kawasan Layanan Jasa dan Perkotaan terdiri dari 3 desa yaitu Desa Baruga, Desa Puncak Indah dan Kelurahan Malili.
 10. Kawasan Penunjang pengolahan hasil laut, terdiri dari 2 desa yaitu Desa Laskap dan Desa Pongkeru.
5. Kawasan Peruntukan Pariwisata



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, (3) Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, (4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

- a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM;
 - Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan;
 - Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Luwu Timur yang cukup dominan;
 - Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi;
 - Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM;



- Belum maksimalnya usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

b. Bidang Perdagangan

- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTP yang dimiliki;
- Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.

**3.5.1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
*Sustainable Development Goals (SDGs)***

Isu strategis yang terkait dengan upaya pencapaian TPB/SDGs meliputi 2 Tujuan, 2 (dua) Target dan 2 (dua) Indikator TPB/SDGs yang relevan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut:



Tabel 3.3
 Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs
 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
 Perindustrian Kabupaten Luwu Timur

| No. | Tujuan | Target | Indikator Kinerja |
|-----|---|--|---|
| 1. | Tujuan TPB/SDGs No.8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi semua | 1. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 2. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro keuangan. | 1. Proporsi kredit umkm terhadap total kredit. 2. Persentase akses umkm (usaha mikro, kecil, dan menengah) kelayakan keuangan. |
| 2. | Tujuan TPB/SDGs No.9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | 1. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat | 1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. 2. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. |

| | | | | |
|--|--|---|--|----|
| | | proporsinya di negara kurang berkembang | | 89 |
|--|--|---|--|----|



BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN
JANGKA MENENGAH DAERAH****4.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Berikut Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel :



TABEL T-C.25 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

91

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat | Pengeluaran/ Kapita | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | % Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | 90% | 95% | 95% | 97% | 98% | 100% |
| 2 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM | Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan | Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi IKM | 0,078% | 0,10% | 0,12% | 0,13% | 0,15% | 0,16% |
| | | % UMKM yang naik kategori | | Pertumbuhan nilai produksi UMKM | 5,16% | 7,55% | 8,77% | 9,68% | 10,29% | 10,29% |
| | | | | % Koperasi aktif | 76,00% | 77,10% | 78,51% | 79,12% | 80,00% | 80,00% |
| | | | | Pertumbuhan sub sektor perdagangan | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| 3 | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | 95% | 95% | 95% | 97% | 98% | 100% |

BAB V**STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ke depan maka dibutuhkan peta strategi dan kebijakan dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian untuk setiap program prioritas pada yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI : Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya | | | |
|--|--|---|--|
| MISI 2 : Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan - Meningkatkan koordinasi dan peran serta pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM | Meningkatnya pertumbuhan produksi UMKM | <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kewirausahaan dan SDM koperasi dan UMKM - Mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah - Partisipasi dalam pameran dagang (misi dagang) untuk meningkatkan wawasan para pelaku usaha/UKM - Peningkatan penerapan standarisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang professional dan kompeten - Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha - Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan usaha koperasi dan UMKM (termasuk pemanfaatan IT) - Meningkatkan pangsa pasar regional dan internasional |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>produk (sertifikasi halal, keamanan pangan dan obat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemahaman anggota koperasi dan UMKM dan masyarakat dalam Mengembangkan koperasi dan UMKM melalui kompetensi manajemen pengelolaan, pemasaran, kemitraan, permodalan - Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha - Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha - Peningkatan akses pembiayaan dan skema kerjasama - Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi melalui penguatan kelembagaan koperasi - Meningkatkan daya saing UMKM di pasar regional dan domestik - Pemenuhan barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional |
|--|--|--|--|

MISI 4 : Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|--|
| Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan pemerintahan daerah | Meningkatnya kualitas dan pencapaian dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana dan prasarana publik di sektor koperasi, perdagangan, usaha kecil dan menengah - Meningkatkan evaluasi dan pelaporan keuangan yang | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di sektor koperasi dan umkm, perdagangan - Peningkatan evaluasi dan pelaporan keuangan yang |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>transparan dan akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui diklat dan bimtek sesuai bidang tugasnya | <p>transparan dan akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui diklat dan bimtek sesuai bidang tugasnya |
|--|--|--|---|



BAB VI**RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN****6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaannya Serta Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Program yang merupakan instrument kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dan sub.kegiatanv akan dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat daerah (OPD). Sedangkan kegiatan dan sub.kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur, maka program, kegiatan dan sub.kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel T.C 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Tahun 2021-2026

Visi Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Indikator Sasaran Renstra | Kode Rekening | Program dan Kegiatan Renstra | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Asumsi Capaian Kinerja dan Pendanaan 2021) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | Rp | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|----|--|--|---|---------------|--|---|---|--|-------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|----|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Tahun-1 (2022) | | Tahun-2 (2023) | | Tahun-3 (2024) | | Tahun-4 (2025) | | Tahun-5 (2026) | | | | | |
| | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| | Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | % Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun (%) | | | | 90 | 90 | 481,580,587 | 95,00 | 530,730,735 | 95,00 | 551,690,735 | 97,00 | 601,730,735 | 98,00 | 630,730,735 | 100,00 | 651,730,735 | 2,966,613,675 | | | |
| | | | | 4 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) | 9 | 9 | 333,747,012 | 8,50 | 341,873,635 | 8,00 | 362,833,635 | 7,80 | 412,873,635 | 7,50 | 441,873,635 | 7,50 | 462,873,635 | 2,022,328,175 | | | |
| | | | | 004.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%) | | 44 | 306,847,276 | 44,00 | 314,973,899 | 44,00 | 335,933,899 | 44,00 | 385,973,899 | 44,00 | 414,973,899 | 44,00 | 435,973,899 | 1,887,829,495 | | | |
| | | | | 004.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak | Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (RTM) | | 1800 | 221,361,856 | 1,800 | 229,488,479 | 2,000 | 250,448,479 | 2,100 | 300,488,479 | 2,200 | 329,488,479 | 2,300 | 350,488,479 | 1,460,402,395 | | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|----------------|--|--|--|
| | | | | Kabupaten/Kota | (Dokumen) | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi yang berkualitas (%) | 29.12 | 29.12 | 28,704,810 | 30.82 | 96,007,500 | 32.63 | 100,370,000 | 34.44 | 110,370,000 | 36.13 | 115,370,000 | 36.13 | 120,000,000 | 542,117,500 | | | |
| | | | 003.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ko ta (%) | | 50.15 | 28,704,810 | 70.35 | 96,007,500 | 75.70 | 100,370,000 | 82.15 | 110,370,000 | 90.20 | 115,370,000 | 90.20 | 120,000,000 | 542,117,500 | | | |
| | | | 003.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi (Koperasi) | | 126 | 28,704,810 | 13.60 | 96,007,500 | 14.60 | 100,370,000 | 15.60 | 110,370,000 | 16.60 | 115,370,000 | 166.00 | 120,000,000 | 542,117,500 | | | |
| | | | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/dire vitalisasi (%) | 10 | 10 | 2,691,643,772 | 10.00 | 1,854,453,800 | 10.00 | 2,059,463,175 | 10.00 | 2,361,463,175 | 10.00 | 2,569,463,175 | 10.00 | 3,069,463,175 | 11,914,306,500 | | | |
| | | | 003.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatka n (Pasar) | | 5 | 2,691,643,772 | 5.00 | 1,834,453,800 | 5.00 | 2,034,453,800 | 5.00 | 2,334,453,800 | 5.00 | 2,534,453,800 | 5.00 | 3,034,453,800 | 11,772,269,000 | | | |
| | | | 003.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang dibangun/dire vitalisasi serta sarana dan | | 5 | 2,691,643,772 | 5.00 | 1,834,453,800 | 5.00 | 2,034,453,800 | 5.00 | 2,334,453,800 | 5.00 | 2,534,453,800 | 5.00 | 3,034,453,800 | 11,772,269,000 | | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | | | 00 4. 01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%) | 45.5 2 | 66,8 54,9 36 | 49. 70 | 66,8 54,9 36 | 51. 62 | 81,8 64,8 00 | 54. 52 | 85,9 58,0 40 | 55. 81 | 88,5 36,7 81 | 55.8 1 | 91,1 92,8 84 | 414,407,441 | | | |
| | | | | 00 4. 01. 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP (Koperasi) | 15 | 66,8 54,9 36 | 15. 00 | 66,8 54,9 36 | 15. 00 | 81,8 64,8 00 | 15. 00 | 85,9 58,0 40 | 15. 00 | 88,5 36,7 81 | 40.0 0 | 91,1 92,8 84 | 414,407,441 | | | |
| | | | | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar (%) | 4 | 4 | 55,9 55,2 86 | 5.0 0 | 51,0 18,5 10 | 7.0 0 | 101, 018, 510 | 10. 00 | 101, 018, 510 | 15. 00 | 101, 018, 510 | 37.0 0 | 101, 018, 510 | 455,092,550 | | |
| | | | | 00 4. 01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase usaha industri yang dikelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS) (%) | | | 55,9 55,2 86 | 50. 00 | 51,0 18,5 10 | 50. 00 | 101, 018, 510 | 53. 85 | 101, 018, 510 | 56. 25 | 101, 018, 510 | 60.0 0 | 101, 018, 510 | 455,092,550 | | |
| | | | | 00 4. 01. 03 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/ko ta yang dipantau dan dievaluasi dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional | 0 | - | - .00 | - | 5.0 0 | 50,0 00,0 00 | 7.0 0 | 50,0 00,0 00 | 8.0 0 | 50,0 00,0 00 | 12.0 0 | 50,0 00,0 00 | 200,000,000 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---|--|------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | (SINAS) (Usaha industri) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 00 4. 01. 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SINAS) (Dokumen) | 1 | 55,9 55,2 86 | 1.0 0 | 51,0 18,5 10 | 1.0 0 | 51,0 18,5 10 | 1.0 0 | 51,0 18,5 10 | 1.00 | 51,0 18,5 10 | 255,092,550 | | | | |
| | | | | 5 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 9.92 | 9.92 | 158, 695, 354 | 10. 71 | 93,4 45,3 54 | 12. 18 | 93,4 45,3 54 | 14. 12 | 93,4 45,3 54 | 15. 61 | 93,4 45,3 54 | 15.6 1 | 93,4 45,3 54 | 467,226,770 | |
| | | | | 00 5. 01. 01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota (%) | | 11.2 5 | 158, 695, 354 | 17. 74 | 93,4 45,3 54 | 25. 31 | 93,4 45,3 54 | 33. 15 | 93,4 45,3 54 | 40. 93 | 93,4 45,3 54 | 40.9 3 | 93,4 45,3 54 | 467,226,770 | |
| | | | | 00 5. 01. 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta | | 15 | 158, 695, 354 | 15. 00 | 93,4 45,3 54 | 15. 00 | 93,4 45,3 54 | 15. 00 | 93,4 45,3 54 | 15.0 0 | 93,4 45,3 54 | 467,226,770 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---|--|----|-----|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------------|--|--|
| | | | | | kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (Koperasi) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase peningkatan nilai ekspor (%) | 15 | 15 | 49,503,585 | 15 | 271,421,303 | 15 | 340,421,000 | 15 | 355,421,000 | 15 | 366,421,000 | 15 | 396,616,000 | 1,730,300,303 | | |
| | | | | 005.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang (%) | | 20 | 49,503,585 | 20.00 | 271,421,303 | 40.00 | 340,421,000 | 40.00 | 355,421,000 | 40.00 | 366,421,000 | 60.00 | 396,616,000 | 1,730,300,303 | | |
| | | | | 005.01.02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional (Produk) | | 0 | - | 1.00 | 171,805,000 | 1.00 | 200,805,000 | 1.00 | 210,805,000 | 1.00 | 220,805,000 | 1.00 | 250,000,000 | 1,054,220,000 | | |
| | | | | 005.01.06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina (Pelaku usaha) | | 25 | 35,352,060 | 25.00 | 35,352,060 | 25.00 | 40,000,000 | 25.00 | 40,000,000 | 25.00 | 40,000,000 | 25.00 | 40,000,000 | 195,352,060 | | |
| | | | | 005.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha (Usaha) | | 220 | 14,151,525 | 22.00 | 14,151,525 | 22.50 | 20,151,000 | 23.00 | 25,151,000 | 23.50 | 26,151,000 | 235.00 | 27,151,000 | 112,755,525 | | |
| | | | | 005.01.04 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang (Produk) | | 0 | - | 1.00 | 50,112,718 | 1.00 | 79,465,000 | 1.00 | 79,465,000 | 1.00 | 79,465,000 | 1.00 | 79,465,000 | 367,972,718 | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|------|----|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------------|--|--|
| | | | | 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi (%) | 0.41 | 0 | - | 3.15 | 25,563,680 | 4.90 | 30,563,680 | 5.64 | 35,279,800 | 6.75 | 39,279,800 | 6.75 | 41,243,790 | 171,930,750 | | |
| | | | | 006.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha (%) | | 0 | - | 3.00 | 25,563,680 | 4.90 | 30,563,680 | 5.64 | 35,279,800 | 6.75 | 39,279,800 | 6.75 | 41,243,790 | 171,930,750 | | |
| | | | | 006.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Koperasi) | | 0 | - | 4.00 | 25,563,680 | 20.00 | 30,563,680 | 20.00 | 35,279,800 | 20.00 | 39,279,800 | 20.00 | 41,243,790 | 171,930,750 | | |
| | | | | 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%) | 35 | 35 | 63,547,254 | 40.00 | 178,103,694 | 45.00 | 232,215,324 | 50.00 | 251,215,324 | 55.00 | 278,503,824 | 60.00 | 284,402,749 | 1,224,440,915 | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|--|------|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|--|--|--|
| | | | 02 | Mikro | bermitra (usaha mikro dan kecil) | | | | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 25 | | | | |
| | | | 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Rasio pertumbuhan skala usaha mikro (%) | 3.36 | 3.36 | 239,488,479 | 2.27 | 114,461,660 | 3.89 | 114,461,660 | 5.19 | 125,461,660 | 6.36 | 130,462,660 | 8.16 | 132,462,660 | 617,310,300 | | | |
| | | | 008.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase peningkatan skala usaha mikro (%) | | 3.62 | 239,488,479 | 6.81 | 114,461,660 | 7.05 | 114,461,660 | 7.36 | 125,461,660 | 7.77 | 130,462,660 | 8.30 | 132,462,660 | 617,310,300 | | | |
| | | | 008.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha (Usaha mikro dan kecil) | | 35 | 239,488,479 | 15.00 | 114,461,660 | 17.00 | 114,461,660 | 18.00 | 125,461,660 | 19.00 | 130,462,660 | 21.00 | 132,462,660 | 617,310,300 | | | |
| Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program penunjang urusan perangkat daerah kabupaten/kota (%) | | | | 95 | | 3,828,137,300 | 95.00 | 3,705,056,293 | 95.00 | 4,116,573,832 | 97.00 | 4,264,654,896 | 98.00 | 4,420,236,632 | 100.00 | 4,431,812,896 | 20,938,334,549 | | | |
| | | | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 95 | | 3,828,137,300 | 95.00 | 3,705,056,293 | 95.00 | 4,116,573,832 | 97.00 | 4,264,654,896 | 98.00 | 4,420,236,632 | 100.00 | 4,431,812,896 | 20,938,334,549 | | | |
| | | | 001.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%) | | | 69,483,750 | 100.00 | 73,770,739 | 100.00 | 69,098,699 | 100.00 | 69,099,699 | 100.00 | 69,099,699 | 100.00 | 69,099,699 | 350,168,535 | | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|---------------------------|----------------|--|--|
| | | | | 00 1. 01. 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen) | 0 | - | 1.0 0 | 1,52 5,63 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,525,639 | | |
| | | | | 00 1. 01. 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 3 | 24,4 53,7 51 | 3.0 0 | 27,0 63,7 51 | 2.0 0 | 24,0 68,7 00 | 3.0 0 | 24,0 69,7 00 | 2.0 0 | 24,0 69,7 00 | 3.00 | 24,0 69,7 00 | 123,341,551 | | |
| | | | | 00 1. 01. 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 | 2,92 5,65 3 | 2.0 0 | 1,99 6,80 3 | 1.0 0 | 2,92 5,65 3 | 2.0 0 | 2,92 5,65 3 | 2.0 0 | 2,92 5,65 3 | 2.00 | 2,92 5,65 3 | 13,699,415 | | |
| | | | | 00 1. 01. 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen) | 0 | - | 1.0 0 | 2,27 2,00 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,272,003 | | |
| | | | | 00 1. 01. 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | 10 | 38,6 40,5 40 | 10. 00 | 38,6 40,5 40 | 10. 00 | 38,6 40,5 40 | 10. 00 | 38,6 40,5 40 | 10. 00 | 38,6 40,5 40 | 10.0 0 | 38,6 40,5 40 | 193,202,700 | | |
| | | | | 00 1. 01. 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 | 3,46 3,80 6 | 1.0 0 | 2,27 2,00 3 | 2.0 0 | 3,46 3,80 6 | 2.0 0 | 3,46 3,80 6 | 2.0 0 | 3,46 3,80 6 | 2.00 | 3,46 3,80 6 | 16,127,227 | | |
| | | | | 00 1. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%) | 100 | 2,79 2,41 6,07 7 | 10 0.0 0 | 2,91 0,22 7,67 8 | 10 0.0 0 | 3,22 8,26 9,87 5 | 10 0.0 0 | 3,32 8,26 9,87 5 | 10 0.0 0 | 3,42 8,26 9,87 5 | 100. 00 | 3,42 8,26 9,87 5 | 16,323,307,178 | | |
| | | | | 00 1. 02. 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | 18 | 36,3 35,9 00 | 18. 00 | 36,3 35,9 00 | 18. 00 | 36,3 35,9 00 | 18. 00 | 36,3 35,9 00 | 18. 00 | 36,3 35,9 00 | 18.0 0 | 36,3 35,9 00 | 181,679,500 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|---------------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00 1. 02. 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | 23 | 2,75 6,08 0,17 7 | 23. 00 | 2,87 3,89 1,77 8 | 28. 00 | 3,19 1,93 3,97 5 | 28. 00 | 3,29 1,93 3,97 5 | 28. 00 | 3,39 1,93 3,97 5 | 28.0 0 | 3,39 1,93 3,97 5 | 16,141,627,678 | | | | |
| | | | 00 1. 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%) | 100 | 10,0 26,3 10 | 10 0,0 0 | 19,6 26,3 10 | 10 0,0 0 | 9,46 0,00 0 | 10 0,0 0 | 9,46 0,00 0 | 10 0,0 0 | 9,46 0,00 0 | 100. 00 | 9,46 0,00 0 | 57,466,310 | | | | |
| | | | 00 1. 03. 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen) | 0 | - | 2,0 0 | 5,50 0,00 0 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - | 5,500,000 | | | | |
| | | | 00 1. 03. 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | 0 | - | 7,0 0 | 1,30 0,00 0 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - | 1,300,000 | | | | |
| | | | 00 1. 03. 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | 2 | 10,0 26,3 10 | 2,0 0 | 9,02 6,31 0 | 2,0 0 | 9,46 0,00 0 | 2,0 0 | 9,46 0,00 0 | 2,0 0 | 9,46 0,00 0 | 2,00 | 9,46 0,00 0 | 46,866,310 | | | | |
| | | | 00 1. 03. 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen) | 0 | - | 2,0 0 | 3,80 0,00 0 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - | 3,800,000 | | | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---|---|-----|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | | | 00 1. 04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%) | 100 | 5,76 5,50 0 | 10 0,0 0 | 6,86 5,50 0 | 10 0,0 0 | 5,78 6,60 0 | 10 0,0 0 | 5,78 6,60 0 | 100. 00 | 5,78 6,60 0 | 30,011,900 | | |
| | | | | 00 1. 04. 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen) | 1 | 5,76 5,50 0 | 1,0 0 | 5,76 5,50 0 | 1,0 0 | 5,78 6,60 0 | 1,0 0 | 5,78 6,60 0 | 1,00 | 5,78 6,60 0 | 28,911,900 | | |
| | | | | 00 1. 04. 04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah yang disusun (Dokumen) | 0 | - | 1,0 0 | 1,10 0,00 0 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - | 1,100,000 | | |
| | | | | 00 1. 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) | 100 | 108, 141, 425 | 10 0,0 0 | 97,3 39,8 69 | 10 0,0 0 | 121, 651, 425 | 10 0,0 0 | 151, 451, 425 | 100. 00 | 155, 451, 425 | 679,345,569 | | |
| | | | | 00 1. 05. 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan (orang) | 0 | - | 3,0 0 | 4,59 8,44 4 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - | 4,598,444 | | |
| | | | | 00 1. 05. 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang) | 2 | 24,5 40,0 00 | 2,0 0 | 47,7 50,0 00 | 3,0 0 | 52,4 00,0 00 | 3,0 0 | 55,4 00,0 00 | 3,00 | 59,4 00,0 00 | 272,350,000 | | |
| | | | | 00 1. 05. 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan) | 12 | 16,1 71,4 25 | 12. 00 | 13,6 21,4 25 | 12. 00 | 25,6 21,4 25 | 12. 00 | 25,6 21,4 25 | 12,0 0 | 25,6 21,4 25 | 116,107,125 | | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|---|-----|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | 00 1. 05. 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | 10 | 43,6 30,0 00 | 10. 00 | 31,3 70,0 00 | 10. 00 | 43,6 30,0 00 | 10. 00 | 43,6 30,0 00 | 10.0 0 | 43,6 30,0 00 | 205,890,000 | 112 | | |
| | | | | 00 1. 05. 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapann ya yang diadakan (stel) | 23 | 23,8 00,0 00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | 27. 00 | 26,8 00,0 00 | - .00 | 26,8 00,0 00 | 27.0 0 | 26,8 00,0 00 | 80,400,000 | |
| | | | | 00 1. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%) | 100 | 474, 501, 736 | 10 0,0 0 | 347, 901, 100 | 10 0,0 0 | 398, 482, 136 | 10 0,0 0 | 406, 762, 200 | 10 0,0 0 | 413, 343, 936 | 100. 00 | 420, 920, 200 | 1,987,409,572 | |
| | | | | 00 1. 06. 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | 3 | 12,5 00,0 00 | 3,0 0 | 12,8 00,0 00 | 3,0 0 | 12,8 00,0 00 | 3,0 0 | 12,8 00,0 00 | 3,0 0 | 12,8 00,0 00 | 3,00 | 12,8 00,0 00 | 64,000,000 | |
| | | | | 00 1. 06. 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | 423 | 415, 412, 200 | 20 0,0 0 | 310, 020, 000 | 22 0,0 0 | 333, 020, 000 | 23 0,0 0 | 340, 020, 000 | 24 0,0 0 | 345, 020, 000 | 250. 00 | 350, 020, 000 | 1,678,100,000 | |
| | | | | 00 1. 06. 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit) | 35 | 23,2 27,7 36 | 5,0 0 | 2,00 0,00 0 | 20. 00 | 12,4 99,7 36 | 20. 00 | 12,8 90,0 00 | 30. 00 | 13,4 99,7 36 | 30,0 0 | 15,0 00,0 00 | 55,889,472 | |
| | | | | 00 1. 06. 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | 242 | 4,96 0,00 0 | 20 0,0 0 | 4,00 0,00 0 | 20 0,0 0 | 4,00 0,00 0 | 20 0,0 0 | 4,00 0,00 0 | 20 0,0 0 | 4,00 0,00 0 | 200. 00 | 4,00 0,00 0 | 20,000,000 | |
| | | | | 00 1. 06. 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di | 10 | 2,49 8,10 0 | 10. 00 | 2,49 8,10 0 | 10. 00 | 2,68 1,20 0 | 10. 00 | 2,68 1,20 0 | 10. 00 | 2,68 1,20 0 | 10,0 0 | 2,68 1,20 0 | 13,222,900 | |



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---|---|----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------|--|--|
| | | | | 00 1. 07. 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | 2 | 6,01 9,50 0 | 1,0 0 | 2,01 9,50 0 | 2,0 0 | 6,01 9,50 0 | 2,0 0 | 6,01 9,50 0 | 2,0 0 | 6,01 9,50 0 | 2,00 | 6,01 9,50 0 | 26,097,500 | | | |
| | | | | 00 1. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) | 100 | 124, 985, 861 | 10 0,0 0 | 126, 185, 861 | 10 0,0 0 | 125, 185, 861 | 10 0,0 0 | 125, 185, 861 | 10 0,0 0 | 137, 185, 861 | 100, 00 | 137, 185, 861 | 650,929,305 | | | |
| | | | | 00 1. 08. 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | 5 | 68,4 00,0 00 | 5,0 0 | 68,4 00,0 00 | 5,0 0 | 68,4 00,0 00 | 5,0 0 | 68,4 00,0 00 | 5,0 0 | 68,4 00,0 00 | 5,00 | 68,4 00,0 00 | 342,000,000 | | | |
| | | | | 00 1. 08. 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | 130 0 | 785, 861 | 1,5 00, 00 | 985, 861 | 1,5 00, 00 | 985, 861 | 1,5 00, 00 | 985, 861 | 1,5 00, 00 | 985, 861 | 1,50 0,00 | 985, 861 | 4,929,305 | | | |
| | | | | 00 1. 08. 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | 4 | 55,8 00,0 00 | 4,0 0 | 55,8 00,0 00 | 4,0 0 | 55,8 00,0 00 | 4,0 0 | 55,8 00,0 00 | 5,0 0 | 67,8 00,0 00 | 5,00 | 67,8 00,0 00 | 303,000,000 | | | |
| | | | | 00 1. 08. 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis) | 0 | - | 1,0 0 | 1,00 0,00 0 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - .00 | - | - | 1,000,000 | | |
| | | | | 00 1. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) | 100 | 119, 955, 000 | 10 0,0 0 | 107, 120, 000 | 10 0,0 0 | 107, 120, 000 | 10 0,0 0 | 107, 120, 000 | 10 0,0 0 | 107, 120, 000 | 100, 00 | 107, 120, 000 | 535,600,000 | | | |

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------------------|--|---|--|----|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | 00 1. 09. 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit) | | 10 | 58,8 50,0 00 | 10. 00 | 58,8 50,0 00 | 10. 00 | 58,8 50,0 00 | 10. 00 | 58,8 50,0 00 | 10,0 0 | 58,8 50,0 00 | 294,250,000 | 115 | | | |
| | | | | 00 1. 09. 09 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi (Unit) | | 11 | 35,0 25,0 00 | 3,0 0 | 20,0 00,0 00 | 3,0 0 | 20,0 00,0 00 | 3,0 0 | 20,0 00,0 00 | 3,00 | 20,0 00,0 00 | 100,000,000 | | | | |
| | | | | 00 1. 09. 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | | 54 | 26,0 80,0 00 | 54. 00 | 28,2 70,0 00 | 54. 00 | 28,2 70,0 00 | 54. 00 | 28,2 70,0 00 | 54,0 0 | 28,2 70,0 00 | 141,350,000 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 8,08 7,71 7,45 9 | | 7,17 3,44 3,56 1 | | 9,23 1,59 5,11 0 | | 9,30 5,48 0,53 4 | | 9,25 9,93 0,51 1 | | 9,84 0,85 0,79 3 | 52,899,017,968 | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.



Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | TARGET RPJMD 2021 - 2026 | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2. | Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 9% | 8,50% | 8% | 7,80% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| 3. | Persentase peningkatan nilai ekspor | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 4. | Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTP | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5. | Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam | 1,44% | 6% | 9,85% | 12,65% | 14,72% | 14,72% | 14,72% |
| 6. | Persentase koperasi yang berkualitas | 29,12% | 30,82% | 32,63% | 34,44% | 36,13% | 36,13% | 36,13% |

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | TARGET RPJMD 2021 - 2026 | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|--------------------------|--------|-----------|--------|--------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 7. | Persentase koperasi sehat | 30,02% | 31,25% | 32,8% | 34,34% | 35,75% | 35,75% | 35,75% |
| 8. | Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan | 9,92% | 10,71% | 12,18% | 14,12% | 15,61% | 15,61% | 15,61% |
| 9. | Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi | 0,41% | 3,15% | 4,9% | 5,64% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
| 10. | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% |
| 11. | Rasio pertumbuhan skala usaha mikro | 3,36% | 2,27% | 3,89% | 5,19% | 6,36% | 8,16% | 8,16% |
| 12. | Jumlah peraturan Bupati (Perbup) kawasan industri yang ditetapkan | - | - | - | 1 Dokumen | - | - | - |



| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | TARGET RPJMD 2021 - 2026 | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|---|--------------------------|--------|-------|--------|--------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 13 | Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali | - | - | 90,90% | 9166% | 92,30% | 92,30% | 92,30% |
| 14 | Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar | 4% | 5% | 7% | 10% | 15% | 37% | 37% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini dibuat dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja lima tahunan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan menjaga sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan Program dan Kegiatan serta merupakan dokumen perencanaan taktis, strategis dinas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman kepada visi dan misi Kepala dan Wakil Daerah terpilih tertuang pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Dokumen ini berisi program, kegiatan, alokasi dana indikatif yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, pagu indikatif sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dapat kami susun dengan harapan rencana kerja ini bisa memberikan dorongan motivasi dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Malili, November 2021
Kepala Dinas,

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19650110 198602 2 004



